# LAPORAN PENYELENGGARAAN
# PEMERINTAHAN KALURAHAN
# AKHIR MASA JABATAN LURAH TRIMULYO
# PERIODE TAHUN 2017-2022
# KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON JETIS
# KABUPATEN BANTUL

**PEMERINTAH KALURAHAN TRIMULYO**

**KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2017-2022.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat secara tertulis paliang lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Oleh karena itu, berkaitan akan berakhirnya masa jabatan Lurah Trimulyo maka Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam pelaksanaan tugas sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa kami tidak mungkin dapat berbuat apa-apa tanpa mendapat dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Trimulyo, begitu pula dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa adanya peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung sehingga proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo ini dapat kami selesaikan dengan baik.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Trimulyo, 19 Juli 2022
Lurah Trimulyo,

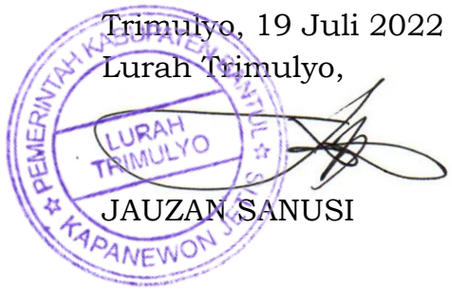


JAUZAN SANUSI

**DAFTAR ISI**

Halaman

**KATA PENGANTAR**..... i
**DAFTAR ISI** ..... ii
**BAB I. PENDAHULUAN**..... 1
A. Tujuan Penyusunan Laporan ..... 1
B. Landasan hukum ..... 2
C. Visi dan Misi ..... 6
D. Strategi dan Kebijakan ..... 9
**BAB II. LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN** ..... 11
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan ..... 11
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan ..... 15
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan ..... 19
D. Pogram Kerja Pemberdayaan Masyarakat ..... 23
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan ..... 26
F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... 29
G. Keberhasilan Yang dicapai, Permasalahan Yang Dihadapi, Dan Upaya Yang Ditempuh ..... 32
**BAB III. RENCANA KEGIATAN 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN** ..... 53
**BAB IV. PENUTUP** ..... 64

# BAB I
# PENDAHULUAN

## A. Tujuan Penyusunan Laporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan merupakan Proses Kegiatan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Jabatan oleh Lurah kepada Bupati melalui Panewu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan memuat materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Selama Masa Jabatan Lurah Trimulyo selama kurun waktu 6 (enam) tahun dari Tahun 2017-2022. Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah terdiri dari :

1. Pendahuluan;
2. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022;
3. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022;
4. Program Kerja Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022;
5. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022;
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan Tahun Anggaran 2017-2022;
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh kurun waktu Tahun 2017-2022 meliputi bidang :
   a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan;
   b. bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan;
   c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan;
   d. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan; dan
   e. bidang penanggulangan Bencana Keadaan darurat dan Mendesak.
8. Penutup

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan, Pembinaan

Kemasyarakatan Desa/Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2017-2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kalurahan Tahun 2017-2022. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo periode tahun 2017-2022 disusun dengan tujuan untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo periode tahun 2017-2022 kepada Bupati Bantul melalui Panewu Jetis secara tertulis untuk digunakan sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi tersebut, digunakan sebagai dasar oleh Bupati Bantul untuk menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Kebijakan Bupati Bantul tersebut berisi catatan kinerja dan prestasi Lurah Trimulyo, Program dan Potensi Kalurahan Trimulyo yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disampaikan oleh Bupati Bantul.

**B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Trimulyo Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Trimulyo Tahun 2017 Nomor 4);

## C. Visi dan Misi

### 1.3.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Trimulyo harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan untuk 6 tahun ke depan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Trimulyo adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA DESA TRIMULYO YANG MAJU, MANDIRI, DAN SEJAHTERA“**

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat,

menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

### 1.3.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai Visi desa selama masa enam tahun.

Untuk meraih Visi Lurah Trimulyo seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Trimulyo sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan yang bersih dan berwibawa.
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana serta pendidikan dan kesehatan yang dapat menyejahterakan masyarakat.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Memberdayakan peran keluarga dalam mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat.

## D. Strategi dan Arah Kebijakan Kalurahan

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan Kalurahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Kalurahan, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada periode Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, penguatan peran dan fungsi kelembagaan kemasyarakatan serta penguatan masyarakat desa/kalurahan.

**1. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan**

Pembangunan diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan untuk mendorong pengembangan Kalurahan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta mendorong keterkaitan kalurahan-kota. Kebijakan pembangunan ini dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

**1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:**

a. memfasilitasi kegiatan rutinitas pemerintah kalurahan;
b. memfasilitasi kegiatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lembaga lainnya di tingkat Kalurahan;
c. mempersiapkan data, informasi, dan indeks Kalurahan yang digunakan sebagai acuan bersama dalam perencanaan dan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi kemajuan perkembangan Kalurahan;
d. memastikan secara bertahap pemenuhan alokasi Dana Desa; dan
e. memfasilitasi kerjasama antar Kalurahan.

**1.2. Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan:**

a. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kalurahan dalam hal : pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan (jalan lingkungan, jalan kalurahan, jalan usaha tani, prasarana jalan ,penerangan jalan dan sebagainya);
b. memenuhi kebutuhan sosial dasar masyarakat Kalurahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dasar (penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta tenaga pendidikan dan kesehatan);
c. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan yang berupa akses ke pusat kegiatan ekonomi,

lembaga keuangan, sekolah, dan pusat pemerintahan; dan

d. pembentukan BUMKal.

**1.3. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan:**

a. meningkatkan rutinitas masyarakat miskin dan rentan dalam pengembangan usaha berbasis potensi lokal;
b. memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan rentan melalui penyediaan lapangan usaha, dana bergulir, kewirausahaan, dan lembaga keuangan mikro;
c. pembinaan RT se-Kalurahan Trimulyo;
d. pembinaan LPMKal Trimuly; dan.
e. pembinaan Linmas yang ada di Kalurahan Trimulyo.

**1.4. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan:**

a. meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui penguatan sosial budaya masyarakat dan keadilan gender (kelompok wanita, pemuda, anak, dan TKI).
b. perwujudan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan SDA yang Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Inovasi dan Teknologi Tepat Guna di Kalurahan (dari sektor Pertanian).
c. meningkatkan kegiatan ekonomi Kalurahan yang berbasis komoditas unggulan, melalui pengembangan rantai nilai, peningkatan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau.
d. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana dan produksi olahan.
e. meningkatkan akses masyarakat desa terhadap modal usaha, pemasaran dan informasi pasar.
f. mengembangkan forum ekonomi mikro di wilayah Kalurahan Trimulyo.

Realisasi kegiatan dimasing-masing bidang erat kaitannya dengan potensi pendapatan Kalurahan, untuk itu kegiatan dirinci secara lebih detail meliputi volume, manfaat/sasaran, waktu pelaksanaan dan perkiraan biaya/sumber pembiayaan. Dengan demikian Program Kegiatan dalam RPJM Desa sangat

mempertimbangkan pada sumber pembiayaan dari program-program yang masuk ke Kalurahan, program dari SKPD, jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta tingkat Pendapatan Asli Kalurahan. Secara lebih terperinci program pembanguna desa/kalurahan dijabarkan dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen ini.

**2. Strategi Pencapaian**

Upaya untuk merealisasikan program pembangunan Kalurahan dilakukan tindakan strategis yang bersifat internal dan eksternal.

**2.1. Strategi Internal Pencapaian Program Pembangunan Kalurahan meliputi:**

a. peningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Kalurahan melalui pendayagunaan potensi dan aset-aset Kalurahan yang selama ini belum dikelola secara maksimal serta penataan retribusi ?? administrasi pelayanan publik yang jelas, tegas, transparan dan terjangkau;
b. mendorong peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan yang ditujukan utamanya kepada rumah tangga sejahtera/kaya;
c. penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilahan target pembangunan *supra desa* dan *infra desa*. Artinya target pembangunan yang menjadi wilayah SKPD Kabupaten maupun Provinsi seperti jalan kabupaten dan provinsi beserta bangunan pelengkapnya, maka *leading sector*-nya diserahkan kepada Kabupaten melalui Musrenbang Kapanewon, forum SKPD maupun Musrenbang Kabupaten dan seterusnya. Sedangkan sumber pembiayaan di mana Lurah menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya seperti ADD, maka dialokasikan untuk membiayai target pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kalurahan seperti Jalan Kalurahan, Jalan Pemukiman, Jalan Usaha Tani beserta prasarana pelengkapnya; dan
d. meningkatkan kesadaran kritis, rutinitas dan daya tawar politis masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Hal ini dilakukan agar RPJM Desa yang telah disusun melalui

pendekatan partisipatif ini menjadi media pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat Kalurahan semakin diperhitungkan di hadapan para *stakeholder*.

## 2.2. Strategi Eksternal Pencapaian Program Pembangunan Kalurahan antara lain :

Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan Kalurahan yang dituangkan dalam RPJM Desa pada forum Musrenbang dan forum-forum SKPD, sebagai berikut:

a. membangun kerjasama di tingkat antar Kalurahan untuk mendorong Pemerintah Daerah melakukan re-orientasi kebijakan dalam memperkuat pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
b. mendorong DPRD agar pro rakyat dan membentuk peraturan perundangan daerah yang mendukung pembangunan partisipatif. Hal ini untuk memberikan pedoman dan arah bagi SKPD untuk menyinergikan dan menyelaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan perencanaan pembangunan melalui RPJM Desa;
c. mendorong fungsi DPRD di Dapil setempat sebagai wakil rakyat dalam mengakomodasi aspirasi RPJM Desa melalui haering dan jaring aspirasi. Hal ini sekaligus menjadi pertanggungjawaban wakil rakyat kepada para konstituennya di daerah pemilihan. Sehingga bilamana anggota dewan yang bersangkutan tidak mampu memperjuangkan RPJM Desa, maka masyarakat akan memberikan sanksi politis pada pemilu berikutnya; dan
d. membangun kemitraan dengan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program. Kemitraan tersebut kerjasama dengan dunia usaha dalam bidang pertanian, atau bentuk lain dari partisipasi dunia usaha dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

Strategi internal dan eksternal tersebut diharapkan mampu mencapai indikator program selama 6 tahun ke depan di mana setiap

tahun akan dievaluasi secara bertahap dengan mempertimbangkan masalah dan kondisi darurat pada setiap tahun anggaran.

Pelaksana Kegiatan didukung kelembagaan yang sesuai dengan tupoksi, namun tetap melibatkan masyarakat dan khususnya pemanfaat atau sasaran. Untuk kegiatan yang terkait sarana prasarana umum akan didukung oleh LPMKal, kegiatan yang terkait bidang kesehatan didukung oleh Poskesdes dan Posyandu, bidang pendidikan didukung oleh Komite Sekolah, bidang pertanian didukung oleh HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan kegiatan ekonomi dan usaha masyarakat didukung oleh PKK, bidang kepemudaan akan didukung oleh organisasi kepemudaan desa seperti Karang Taruna dan Remaja Masjid.

Seluruh kegiatan pembangunan beserta capaian tujuan senantiasa dievaluasi secara rutin serta melibatkan masyarakat (partisipatif). Pemantauan, evaluasi dan pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan dengan pendekatan sebagai berikut :

a. mengevaluasi proses pelaksanaan kegiatan baik fisik, biaya, maupun administrasi;
b. mengevaluasi capaian kegiatan secara fisik (volume dan kualitas);
c. mengevaluasi capaian sasaran dan dampak; dan
d. mengevaluasi pelestarian dan keberlanjutan kegiatan.

Sedangkan bentuk pemantauan dan evaluasi yang dapat diterapkan nantinya, adalah sebagai berikut :

a. pemantauan bersama oleh masyarakat dan Bamuskal;
b. musyawarah Pertanggungjawaban oleh masing - masing lembaga yang bertanggung jawab, pelaksanaanya mengikuti ketentuan masing-masing program/kegiatan tersebut;
c. musyawarah evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap capaian-capaian kegiatan RPJM Desa, dilakukan rutin setiap tahun bersamaan dengan Musrenbangdes; dan
d. laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPKal) Lurah dalam setiap akhir tahun anggaran.

# BAB II
# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

## A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Rencana dan realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

Tabel 2.1. Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran | 1.821.674.988,00 | 1.899.220.587,00 | 1.935.537.066,36 | 2.610.822.336,00 | 2.832.104.170,00 |
| 2 | Realisasi | 1.335.639.325,00 | 1.447.891.234,00 | 1.586.320.699,00 | 2.358.286.855,00 | 2.439.336.234,00 |
| 3 | Lebih/Kurang | 486.035.663,00 | 451.329.353,00 | 349.216.367,36 | 252.535.481,00 | 392.767.936,00 |
| 4 | Capaian (%) | 73,32 | 76,24 | 81,96 | 90,33 | 86,13 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada Grafik 2.1. berikut.

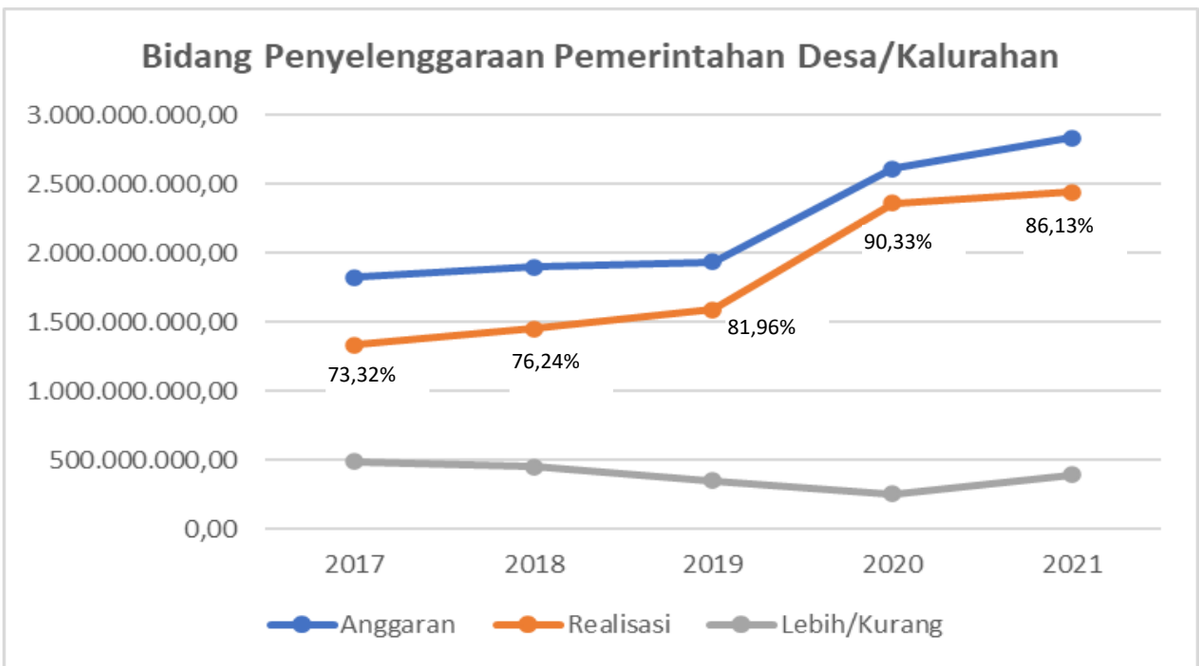


Grafik 2.1. Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari Tabel 2.1. dan Grafik 2.1 diketahui Anggaran dan Realisasi kegiatan trendnya meningkat dari Tahun ke Tahun. Demikian juga capaian realisasi trendnya meningkat dari Tahun 2017-2018 sebesar 2,92%, Tahun 2018-2019 sebesar 5,72%, Tahun 2019-2020 sebesar 8,37%, peningkatan capaian realisasi merupakan indikator beberapa hal sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap Rencana dan Realisasi tahun sebelumnya berjalan dengan baik.
b. Kinerja Pemerintahan Kalurahan meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kapasitas Lurah, Pamong kalurahan, Bamuskal dan kelembagaan dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan kalurahan.

Namun pada Tahun 2020-2021 menurun sebesar 4,2%, hal ini lebih disebabkan karena Bencana Non Alam Pandemi Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sesuai perkembangan Pandemi dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sebagai penjelasan detailnya, berikut dijabarkan Rincian Anggaran dan Realisasi Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 sebagaimana pada Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2. Rincian Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) | ANGGARAN | REALISASI | Capaian (%) | ANGGARAN | REALISASI | Rata-Rata Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2017 | | | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2017-2021 | | |
| 1 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Pamong Desa | - | - | | 624.066.306 | 624.066.306 | 100 | - | - | | - | - | | - | - | | 624.066.306 | 624.066.306 | 100,00 |
| 2 | Penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa | 469.171.752 | 451.749.472 | 96,29 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 469.171.752 | 451.749.472 | 96,29 |
| 3 | Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa | 35.111.004 | 33.368.776 | 95,04 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 35.111.004 | 33.368.776 | 95,04 |
| 4 | Tunjangan suami/istri Lurah Desa dan Pamong Desa | 39.046.404 | 31.975.008 | 81,89 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 39.046.404 | 31.975.008 | 81,89 |
| 5 | Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa | 13.620.084 | 10.022.892 | 73,59 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 13.620.084 | 10.022.892 | 73,59 |
| 6 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | - | - | | - | - | | 37.440.000 | 37.440.000 | 100 | 53.280.000 | 53.280.000 | 100 | 48.840.000 | 48.840.000 | 100 | 139.560.000 | 139.560.000 | 100,00 |
| 7 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | - | - | | - | - | | 530.073.000 | 514.180.000 | 97 | 806.900.000 | 791.452.000 | 98,09 | 829.048.000 | 786.733.995 | 94,9 | 2.166.021.000 | 2.092.365.995 | 96,66 |
| 8 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 14.075.160 | 11.243.522 | 79,88 | - | - | | 55.340.991,36 | 46.681.542 | 84,35 | 34.480.080 | 29.063.100 | 84,29 | 31.104.500 | 13.936.000 | 44,8 | 135.000.731 | 100.924.164 | 97,77 |
| 9 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 394.035.100 | 238.589.450 | 60,55 | 14.000.000 | 12.000.000 | 85,71 | 239.994.000 | 152.184.380 | 63,41 | 257.394.900 | 186.512.212 | 72,46 | 367.537.555 | 288.655.727 | 78,54 | 1.272.961.555 | 877.941.769 | 72,13 |
| 10 | Penyediaan Tunjangan BPD | 75.800.000 | 75.800.000 | 100 | 58.210.000 | 58.210.000 | 100 | 54.600.000 | 54.600.000 | 100 | 121.240.000 | 113.120.000 | 93,3 | 128.920.000 | 123.800.000 | 96,03 | 438.770.000 | 425.530.000 | 97,87 |
| 11 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 18.066.000 | 9.665.550 | 53,5 | 24.797.500 | 16.544.675 | 66,72 | 17.837.500 | 7.447.650 | 41,75 | 30.000.000 | 26.425.500 | 88,09 | 30.000.000 | 26.933.500 | 89,78 | 120.701.000 | 87.016.875 | 67,97 |
| 12 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 71.400.000 | 71.400.000 | 100 | 80.730.000 | 75.405.000 | 93,4 | 71.400.000 | 66.045.000 | 92,5 | 71.400.000 | 71.400.000 | 100 | 66.045.000 | 32.725.000 | 49,55 | 360.975.000 | 316.975.000 | 87,09 |
| 13 | Tambahan penghasilan dari tanah pelungguh dan bengkok | 194.008.024 | 171.375.255 | 88,33 | 169.081.325 | 165.536.970 | 97,9 | 275.465.325 | 266.523.869 | 96,75 | 534.134.344 | 511.229.326 | 95,71 | 371.962.750 | 366.962.750 | 98,66 | 1.544.651.768 | 1.481.628.170 | 95,47 |
| 14 | Penyediaan tunjangan hari raya | - | - | | - | - | | 49.185.750 | 47.322.750 | 96,21 | 74.440.000 | 70.040.000 | 94,09 | 77.206.000 | 77.206.000 | 100 | 200.831.750 | 194.568.750 | 96,77 |
| 15 | Penyediaan tunjangan purna tugas | - | - | | - | - | | 32.385.000 | 32.130.000 | 99,21 | 38.243.200 | 38.243.200 | 100 | 34.269.200 | 34.269.200 | 100 | 104.897.400 | 104.642.400 | 99,74 |
| 16 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | - | - | | 44.170.000 | 39.425.900 | 89,26 | 171.050.000 | 146.735.500 | 85,79 | 164.000.000 | 160.361.450 | 97,78 | 204.950.000 | 165.744.000 | 80,87 | 584.170.000 | 512.266.850 | 88,43 |
| 17 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | - | - | | 1.400.000 | | | 10.945.000 | 7.715.000 | 70,49 | 23.349.562 | 17.656.000 | 75,62 | 31.747.887 | 25.057.000 | 78,92 | 67.442.449 | 50.428.000 | 75,01 |
| 18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 163.641.750 | 155.506.000 | 95,03 | 163.641.750 | 155.506.000 | 95,03 |
| 19 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 8.220.000 | 4.695.000 | 57,12 | 3.760.000 | 0 | 0 | 4.080.000 | 0 | 0 | 27.595.000 | 21.645.000 | 78,44 | 98.533.800 | 68.078.500 | 69,09 | 142.188.800 | 94.418.500 | 40,93 |
| 20 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 25.000.000 | 25.000.000 | 100 | 41.440.000 | 31.440.000 | 75,87 | - | - | | - | - | | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 | 68.540.000 | 58.540.000 | 91,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | - | - | | - | - | | 13.655.000 | 6.000.000 | 43,94 | 18.360.000 | 4.680.000 | 25,49 | 16.680.000 | 10.800.000 | 64,75 | 48.695.000 | 21.480.000 | 44,73 |
| 22 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 48.319.500 | 31.454.500 | 65,1 | 79.120.000 | 29.732.500 | 37,58 | 57.550.000 | 42.271.600 | 73,45 | 32.565.000 | 24.910.000 | 76,49 | 34.035.000 | 28.889.000 | 84,88 | 251.589.500 | 157.257.600 | 67,50 |
| 23 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | - | - | | - | - | | - | - | | 47.725.000 | 31.870.250 | 66,78 | 45.550.000 | 30.044.500 | 65,96 | 93.275.000 | 61.914.750 | 66,37 |
| 24 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 5.986.000 | 3.131.220 | 52,31 | 9.060.000 | 2.620.000 | 28,92 | 7.860.000 | 1.695.000 | 21,56 | 12.405.000 | 9.735.500 | 78,48 | 13.600.000 | 11.913.000 | 87,6 | 48.911.000 | 29.094.720 | 53,77 |
| 25 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 9.681.500 | 6.129.800 | 63,31 | 14.921.500 | 3.437.000 | 23,03 | 12.040.000 | 5.375.000 | 44,64 | 11.870.000 | 8.074.000 | 68,02 | 10.990.000 | 8.099.000 | 73,69 | 59.503.000 | 31.114.800 | 54,54 |
| 26 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 8.370.000 | 6.225.000 | 74,37 | 28.320.000 | 17.954.500 | 63,4 | 6.770.000 | 5.607.500 | 82,83 | 6.645.000 | 5.645.000 | 84,95 | 9.890.000 | 0 | 0 | 59.995.000 | 35.432.000 | 61,11 |
| 27 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | - | - | | 19.330.000 | 0 | 0 | 42.925.000 | 4.245.500 | 9,89 | 19.832.750 | 13.900.250 | 70,09 | 27.550.000 | 11.349.500 | 41,2 | 109.637.750 | 29.495.250 | 30,30 |
| 28 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 8.316.000 | 3.160.000 | 38 | 7.050.000 | 3.939.000 | 55,87 | 5.440.000 | 2.645.000 | 48,62 | 3.235.000 | 2.413.000 | 74,59 | 3.965.000 | 2.525.000 | 63,68 | 28.006.000 | 14.682.000 | 56,15 |
| 29 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | - | - | | - | - | | 16.600.000 | 3.950.000 | 23,8 | 3.450.000 | 0 | 0 | 3.450.000 | 3.450.000 | 100 | 23.500.000 | 7.400.000 | 41,27 |
| 30 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan Penjaringan Pamong Kalurahan | 62.330.000 | 49.196.500 | 78,93 | 62.330.000 | 49.196.500 | 78,93 | - | - | | - | - | | 52.625.000 | 48.583.500 | 92,32 | 177.285.000 | 146.976.500 | 83,39 |
| 31 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pengisian Staf Honorer Kalurahan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 8.040.000 | 5.624.500 | 69,96 | 8.040.000 | 5.624.500 | 69,96 |
| 32 | Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan | 39.250.000 | 25.614.800 | 65,26 | 13.600.000 | 0 | 0 | 141.065.000 | 82.342.750 | 58,37 | 147.892.500 | 112.246.250 | 75,9 | | | | 341.807.500 | 220.203.800 | 49,88 |
| 33 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 37.821.460 | 27.850.000 | 73,64 | 52.485.000 | 44.470.596 | 84,73 | 68.120.500 | 53.182.658 | 78,07 | 63.790.000 | 54.384.817 | 85,26 | 67.385.528 | 57.970.562 | 86,03 | 289.602.488 | 237.858.633 | 81,55 |
| 34 | Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa | 8.635.000 | 3.855.000 | 44,64 | - | - | | 13.715.000 | 0 | 0 | 6.595.000 | 0 | 0 | | | | 28.945.000 | 3.855.000 | 14,88 |
| 35 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 131.900.000 | 1.950.000 | 1,48 | 9.480.000 | 5.280.000 | 55,7 | - | - | | - | - | | 52.437.200 | 3.540.000 | 6,75 | 193.817.200 | 10.770.000 | 21,31 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

## B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan

Rencana dan realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3. Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran | 1.676.368.000,00 | 2.102.831.500,00 | 2.453.045.250,00 | 1.526.618.750,00 | 1.062.809.287,00 |
| 2 | Realisasi | 1.529.509.000,00 | 2.099.415.000,00 | 2.291.453.500,00 | 1.242.084.600,00 | 981.627.743,00 |
| 3 | Lebih/Kurang | 146.859.000,00 | 3.416.500,00 | 161.591.750,00 | 284.534.150,00 | 81.181.544,00 |
| 4 | Capaian (%) | 91,24 | 99,84 | 93,41 | 81,36 | 92,36 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat dari Grafik 2.2 berikut.

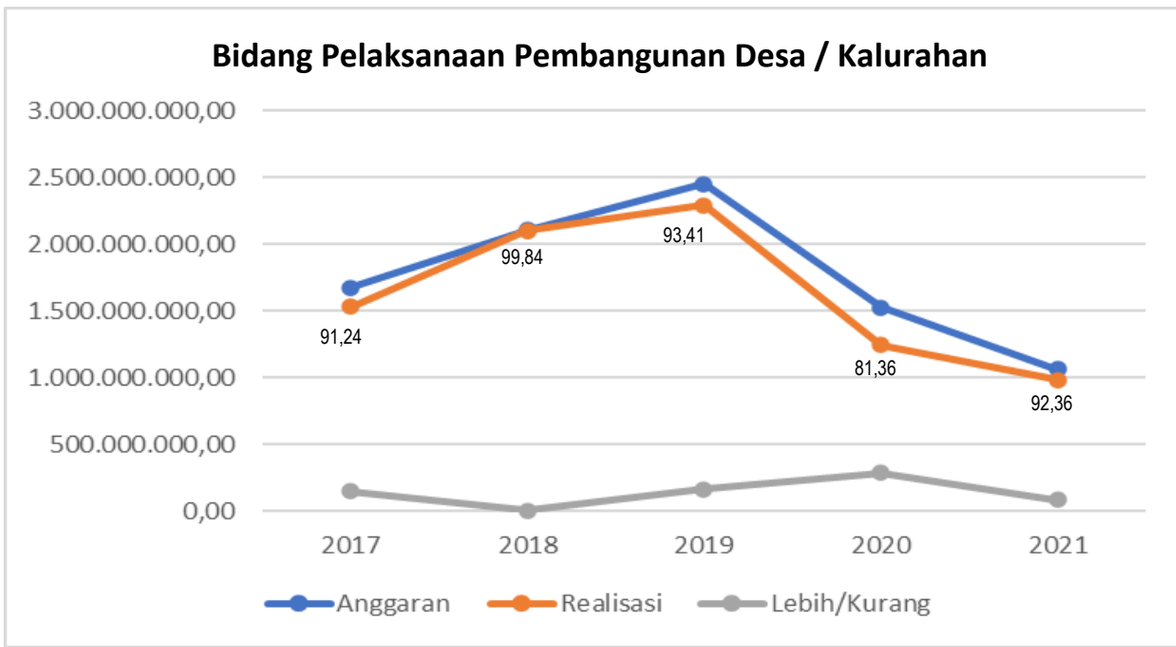


Grafik 2.2. Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari Tabel 2.3. dan Grafik 2.2 diketahui Anggaran dan Realisasi kegiatan trendnya meningkat dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 kemudian menurun sampai Tahun 2021. Capaian realisasi dari

Tahun 2017-2018 naik sebesar 8,6%, Tahun 2018-2019 turun sebesar 6,43%, Tahun 2019-2020 turun sebesar 12,05%, Tahun 2020-2021 naik sebesar 11%, fluktuasi capaian realisasi merupakan indikator :

a. evaluasi terhadap Rencana dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan belum berjalan dengan konsisten.
b. pada perencanaan diperlukan optimalisasi partisipasi unsur masyarakat di sub bidang kesehatan dan sub bidang pendidikan sehingga identifikasi kebutuhan lebih tepat sasaran.
c. Bencana Non Alam Pandemi Covid-19 juga merupakan salah satu faktor penyebab penurunan capaian pada Tahun 2020, karena diperlukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sesuai perkembangan Pandemi dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sebagai penjelasan detailnya, berikut dijabarkan Rincian Anggaran dan Realisasi Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 sebagaimana pada Tabel 2.4. berikut.

## Tabel 2.4. Rincian Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2017-2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal | 55.849.000 | 39.963.930 | 71,56% | 17.755.000 | 17.605.000 | 99,16% | 89.400.000 | 87.688.000 | 98,09% | 12.000.000 | 11.790.000 | 98,25% | 61.322.500 | 61.117.500 | 99,67% | 236.326.500 | 218.164.430 | 92,31% |
| 2 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, SaranabPAUD dst) | 47.100.000 | 39.540.000 | 83,95% | 108.755.000 | 105.045.000 | 96,59% | 55.950.000 | 55.004.000 | 98,31% | 75.408.000 | 73.985.600 | 98,11% | 27.000.000 | 26.344.800 | 97,57% | 314.213.000 | 299.919.400 | 95,45% |
| 3 | Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat | - | - | | - | - | | 58.460.000 | 23.521.000 | 40,23% | 640.750 | - | 0,00% | 4.075.000 | - | 0 | 63.175.750 | 23.521.000 | 37,23% |
| 4 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | - | - | | - | - | | - | - | | 3.116.000 | - | 0,00% | 2.516.000 | - | 0 | 5.632.000 | - | 0,00% |
| 5 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) | 70.181.000 | 28.218.000 | 40,21% | 55.300.000 | 54.591.000 | | 136.040.000 | 121.067.000 | 88,99% | 97.805.000 | 86.571.000 | 88,51% | 104.770.500 | 102.624.993 | 97,95% | 464.096.500 | 393.071.993 | 84,70% |
| 6 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 27.387.500 | 10.000.000 | 36,51% | 35.285.000 | 34.465.000 | 97,68% | 156.814.750 | 108.141.000 | 68,96% | 42.675.000 | 38.297.500 | 89,74% | 59.631.500 | 46.629.000 | 78,20% | 321.793.750 | 237.532.500 | 73,82% |
| 7 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | - | - | | - | - | | 15.850.000 | 3.100.000 | 19,56% | 3.600.000 | 2.400.000 | 66,67% | 14.200.000 | 8.400.000 | 59,15% | 33.650.000 | 13.900.000 | 41,31% |
| 8 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | - | - | | 7.534.049 | 5.310.000 | | - | - | | - | - | | 69.655.000 | 51.620.000 | 74,11% | 77.189.049 | 56.930.000 | 73,75% |
| 9 | Penanganan / pemulihan Balita gizi buruk/ stunting | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 34.680.000 | 20.410.800 | 58,85% | 34.680.000 | 20.410.800 | 58,85% |
| 10 | Gerakan Kebersihan dan kesehatan lingkungan/PSN | 11.535.000 | 2.160.000 | 18,73% | 17.965.420 | 11.460.500 | 63,79% | - | - | | - | - | | 14.870.000 | 1.207.500 | 8,12% | 44.370.420 | 14.828.000 | 33,42% |
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana | - | - | | - | - | | 22.500.000 | 19.800.000 | 88,00% | - | - | | - | - | | 22.500.000 | 19.800.000 | 88,00% |
| 12 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 32.340.000 | 25.920.000 | 80,15% | - | - | | 16.095.000 | 4.232.500 | 26,30% | 21.525.000 | 10.900.000 | 50,64% | - | - | | 69.960.000 | 41.052.500 | 58,68% |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **) | 752.690.000 | 729.545.000 | 96,93% | 341.682.000 | 340.870.000 | 99,76% | 165.900.000 | 165.900.000 | 100,00% | 168.616.000 | 167.623.000 | 99,41% | 214.711.000 | 212.956.000 | 99,18% | 1.643.599.000 | 1.616.894.000 | 98,38% |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan | 245.905.000 | 245.905.000 | 100,00% | 532.353.000 | 531.809.000 | 99,90% | 813.932.000 | 811.482.000 | 99,70% | 507.754.000 | 505.887.000 | 99,63% | 219.136.650 | 218.281.650 | 99,61% | 2.319.080.650 | 2.313.364.650 | 99,75% |
| 15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 195.980.000 | 192.605.000 | 98,28% | 540.845.000 | 540.467.000 | 99,93% | 497.505.000 | 491.755.000 | 98,84% | - | - | | - | - | | 1.234.330.000 | 1.224.827.000 | 99,23% |
| 16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) | 48.317.000 | 47.722.000 | 98,77% | 46.770.000 | 46.770.000 | 100,00% | 98.120.000 | 97.220.000 | 99,08% | 229.778.000 | 76.129.500 | 33,13% | - | - | | 422.985.000 | 267.841.500 | 63,32% |
| 17 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 16.090.000 | 16.090.000 | 100,00% | - | - | | 126.350.000 | 126.350.000 | 100,00% | 133.300.000 | 133.300.000 | 100,00% | - | - | | 275.740.000 | 275.740.000 | 100,00% |
| 18 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 26.195.000 | 25.170.000 | 96,09% | 55.434.500 | 54.562.000 | 98,43% | 58.765.000 | 58.660.000 | 99,82% | 110.681.000 | 110.397.000 | 99,74% | 128.842.137 | 128.742.000 | 99,92% | 379.917.637 | 377.531.000 | 99,37% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | - | - | | - | - | | - | - | | 21.050.000 | 10.934.000 | 51,94% | - | - | | 21.050.000 | 10.934.000 | 51,94% |
| 20 | Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll) | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 3.000.000 | 425.000 | 14,17% | 3.000.000 | 425.000 | 14,17% |
| 21 | Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 3.591.000 | 3.591.000 | 100,00% | 3.591.000 | 3.591.000 | 100,00% |
| 22 | Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, | - | - | | 26.584.250 | 21.635.000 | 81,38% | 21.525.000 | - | 0,00% | - | - | | - | - | | 48.109.250 | 21.635.000 | 44,97% |
| 23 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | - | - | | - | - | | 10.805.000 | 10.320.000 | 95,51% | - | - | | 18.408.000 | 17.360.500 | 94,31% | 29.213.000 | 27.680.500 | 94,75% |
| 24 | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | - | - | | - | - | | 4.335.000 | 3.145.000 | 72,55% | - | - | | - | - | | 4.335.000 | 3.145.000 | 72,55% |
| 25 | Pengelolaan Hutan Milik Desa | - | - | | 6.890.000 | 3.232.500 | 46,92% | - | - | | 14.400.000 | 13.870.000 | 96,32% | - | - | | 21.290.000 | 17.102.500 | 80,33% |
| 26 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **) | 70.624.000 | - | 0,00% | - | - | | 104.698.000 | 104.068.000 | 99,40% | 84.270.000 | - | 0,00% | 70.900.000 | 70.817.000 | 99,88% | 330.492.000 | 174.885.000 | 52,92% |
| 27 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 11.500.000 | 11.100.000 | 96,52% | 11.500.000 | 11.100.000 | 96,52% |
| 28 | Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| 30 | Pembangunan Bangunan Pendukung Gedung PAUD dan TK Desa | 16.090.000 | 16.090.000 | 100,00% | 20.970.000 | 20.970.000 | 100,00% | - | - | | - | - | | - | - | | 37.060.000 | 37.060.000 | 100,00% |
| 31 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Pelayanan Kesehatan tingkat Desa | 60.110.000 | 56.875.000 | 94,62% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 60.110.000 | 56.875.000 | 94,62% |
| 33 | Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air minum desa | 35.000.000 | 34.945.000 | 99,84% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 35.000.000 | 34.945.000 | 99,84% |
| 34 | Rehabilitasi/Pemeliharaan bangunan hasil dari Hibah/Penyerahan | 25.706.000 | 25.706.000 | 100,00% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 25.706.000 | 25.706.000 | 100,00% |
| 35 | Rehabilitasi Bangunan Pendukung Tempat Ibadah | 88.270.000 | 88.270.000 | 100,00% | 324.480.000 | 324.480.000 | 100,00% | - | - | | - | - | | - | - | | 412.750.000 | 412.750.000 | 100,00% |
| 36 | Pembangunan/Rehabilitasi Gapura Desa/Dusun | - | - | | 30.612.000 | 30.512.000 | 99,67% | - | - | | - | - | | - | - | | 30.612.000 | 30.512.000 | 99,67% |
| 37 | Pengadaan/rehabilitasi sarana prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun | - | - | | 195.045.000 | 195.045.000 | 100,00% | - | - | | - | - | | - | - | | 195.045.000 | 195.045.000 | 100,00% |
| 38 | Pembangunan Gedung Pendidikan Agama | 25.615.000 | 25.615.000 | 100,00% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 25.615.000 | 25.615.000 | 100,00% |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

## C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa / Kalurahan

Rencana anggaran dan realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran | 697.311.491,60 | 537.110.000,00 | 573.198.000,00 | 250.802.500,00 | 1.027.426.818,00 |
| 2 | Realisasi | 507.113.991,00 | 448.406.900,00 | 351.478.250,00 | 133.880.000,00 | 657.355.704,00 |
| 3 | Lebih/Kurang | 190.197.500,60 | 88.703.100,00 | 221.719.750,00 | 116.922.500,00 | 370.071.114,00 |
| 4 | Capaian (%) | 72,72 | 83,49 | 61,32 | 53,38 | 63,98 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat dari Grafik 2.3 berikut.

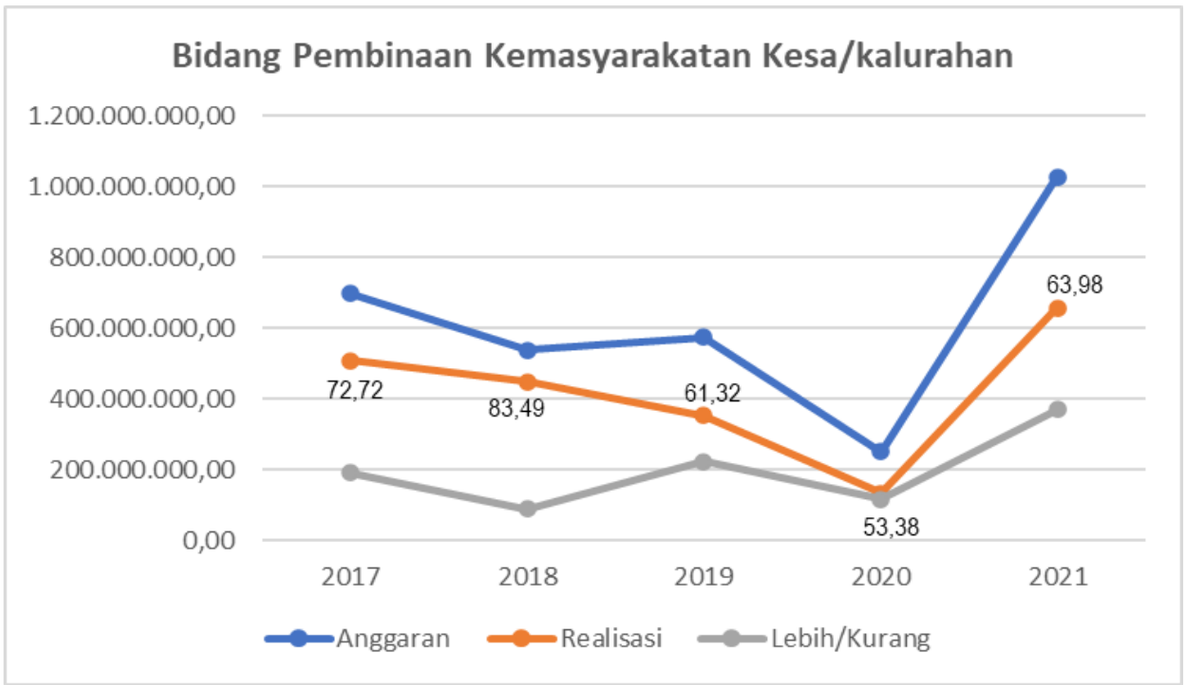


Grafik 2.3. Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari Tabel 2.5. dan Grafik 2.3 diketahui Anggaran dan Realisasi kegiatan trendnya menurun dari Tahun 2017 sampai Tahun 2020 kemudian meningkat di Tahun 2021. Capaian realisasi dari Tahun 2017-2018 naik sebesar 10,77%, Tahun 2018-2019 turun sebesar 22,17%, Tahun 2019-2020 turun sebesar 7,97%, Tahun 2020-2021 naik sebesar 10,6%, fluktuasi capaian realisasi merupakan indikator:

a. evaluasi terhadap Rencana dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan desa / Kalurahan belum berjalan dengan konsisten.
b. pada perencanaan diperlukan optimalisasi partisipasi unsur masyarakat di sub bidang keamanan dan ketertiban, sub bidang kesenian, kegiatan LPMD dan kegiatan Karang Taruna sehingga identifikasi kebutuhan lebih tepat sasaran.
c. bencana Non Alam Pandemi Covid-19 juga merupakan salah satu faktor penyebab penurunan capaian pada Tahun 2020, karena diperlukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sesuai perkembangan Pandemi dan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal

Sebagai penjelasan detailnya, berikut dijabarkan Rincian Anggaran dan Realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 sebagaimana pada Tabel 2.6. berikut.

Tabel 2.6. Rincian Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHUN 2017 | | | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2017- 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN (%) |
| 1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 6.500.000 | 6.240.000 | 96,00% | 6.500.000 | 6.240.000 | 96,00% |
| 2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | - | - | | - | - | | 11.460.000 | 7.970.000 | 69,55% | 7.520.000 | 6.600.000 | 87,77% | 17.370.000 | 2.210.000 | 12,72% | 36.350.000 | 16.780.000 | 46,16% |
| 3 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 8.050.000 | 1.125.000 | 13,98% | 8.050.000 | 1.125.000 | 13,98% |
| 4 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 44.915.000 | 24.041.500 | 53,53% | 44.100.000 | 25.994.000 | 58,94% | 36.840.000 | 9.725.000 | 26,40% | 16.595.000 | 6.500.000 | 39,17% | 25.682.500 | 19.865.250 | 77,35% | 168.132.500 | 86.125.750 | 51,22% |
| 5 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa | - | - | | - | - | | 20.600.000 | 8.870.000 | 43,06% | 7.680.000 | 6.860.000 | 89,32% | 50.725.818 | 35.491.750 | 69,97% | 79.005.818 | 51.221.750 | 64,83% |
| 6 | Penguatan desa Aman Covid-19 | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 622.276.000 | 384.687.500 | 61,82% | 622.276.000 | 384.687.500 | 61,82% |
| 7 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum & Pelindungan Masyarakat | - | - | | - | - | | - | - | | 7.700.000 | 0 | 0,00% | 15.400.000 | 6.477.500 | 42,06% | 23.100.000 | 6.477.500 | 28,04% |
| 8 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | - | - | | - | - | | 58.405.500 | 14.790.000 | 25,32% | 14.400.000 | 9.171.500 | 63,69% | - | - | | 72.805.500 | 23.961.500 | 32,91% |
| 9 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 18.170.000 | 7.200.000 | 39,63% | 19.513.000 | 6.230.000 | 31,93% | 34.465.000 | 16.175.000 | 46,93% | 20.095.000 | 6.123.000 | 30,47% | 31.820.000 | 28.652.000 | 90,04% | 124.063.000 | 64.380.000 | 51,89% |
| 10 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | - | - | | - | - | | 11.200.000 | 7.400.000 | 66,07% | 3.800.000 | 0 | 0,00% | - | - | | 15.000.000 | 7.400.000 | 49,33% |
| 11 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya | 104.885.000 | 90.524.000 | 86,31% | - | - | | 204.180.000 | 167.004.000 | 81,79% | 54.695.000 | 21.430.000 | 39,18% | 32.445.000 | 31.649.750 | 97,55% | 396.205.000 | 310.607.750 | 78,40% |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Pelatihan di bidang keagamaan | 57.060.000 | 53.540.000 | 93,83% | 4.205.000 | 4.105.000 | 97,62% | 7.965.000 | 7.965.000 | 100,00% | 5.620.000 | 5.545.000 | 98,67% | 30.775.000 | 18.435.000 | 59,90% | 105.625.000 | 89.590.000 | 84,82% |
| 13 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | - | - | | - | - | | 61.085.000 | 53.035.500 | 86,82% | 12.880.000 | 10.028.000 | 77,86% | - | - | | 73.965.000 | 63.063.500 | 85,26% |
| 14 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | - | - | | - | - | | 4.585.000 | - | - | 0 | 0 | | - | - | | 4.585.000 | 0 | 0,00% |
| 15 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa | - | - | | - | - | | 10.450.000 | 6.100.000 | 58,37% | 10.700.000 | 7.800.000 | 72,90% | 7.500.000 | 7.500.000 | 100,00% | 28.650.000 | 21.400.000 | 74,69% |
| 16 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | - | - | | - | - | | 24.300.000 | 21.100.000 | 86,83% | 0 | 0 | | - | - | | 24.300.000 | 21.100.000 | 86,83% |
| 17 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 31.420.000 | 30.679.954 | 97,64% | 31.420.000 | 30.679.954 | 97,64% |
| 18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik | - | - | | - | - | | 1.750.000 | - | 0,00% | 6.500.000 | 5.750.000 | 88,46% | 33.125.000 | 28.175.000 | 85,06% | 41.375.000 | 33.925.000 | 81,99% |
| 19 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan | 16.215.000 | 12.050.000 | 74,31% | - | - | | - | - | | - | - | | 30.705.000 | 9.118.000 | 29,70% | 46.920.000 | 21.168.000 | 45,12% |
| 20 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 27.900.000 | 8.000.000 | 28,67% | 27.900.000 | 8.000.000 | 28,67% |
| 21 | Pembinaan PKK | 38.940.000 | 36.700.000 | 94,25% | - | - | | - | - | | - | - | | 46.825.000 | 39.049.000 | 83,39% | 85.765.000 | 75.749.000 | 88,32% |
| 22 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 46.860.491,60 | 43.140.491 | 92,06% | - | - | | 85.912.500 | 31.343.750 | 36,48% | - | - | | 8.907.500 | 0 | | 141.680.492 | 74.484.241 | 52,57% |
| 23 | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 46.345.000 | 31.245.000 | 67,42% | 72.637.500 | 66.967.211 | 92,19% | - | - | | 82.617.500 | 48.072.500 | 58,19% | - | - | | 201.600.000 | 146.284.711 | 72,56% |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

## D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kalurahan

Rencana anggaran dan realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7. Anggaran dan Realisasi Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran | 247.457.004,40 | 513.424.219,00 | 121.908.000,00 | 63.125.000,00 | 250.637.500,00 |
| 2 | Realisasi | 94.956.500,00 | 413.715.211,00 | 94.631.000,00 | 51.995.000,00 | 242.424.500,00 |
| 3 | Lebih/Kurang | 152.500.504,40 | 99.709.008,00 | 27.277.000,00 | 11.130.000,00 | 8.213.000,00 |
| 4 | Capaian (%) | 38,37 | 80,58 | 77,62 | 82,37 | 96,72 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat dari Grafik 2.4 berikut.

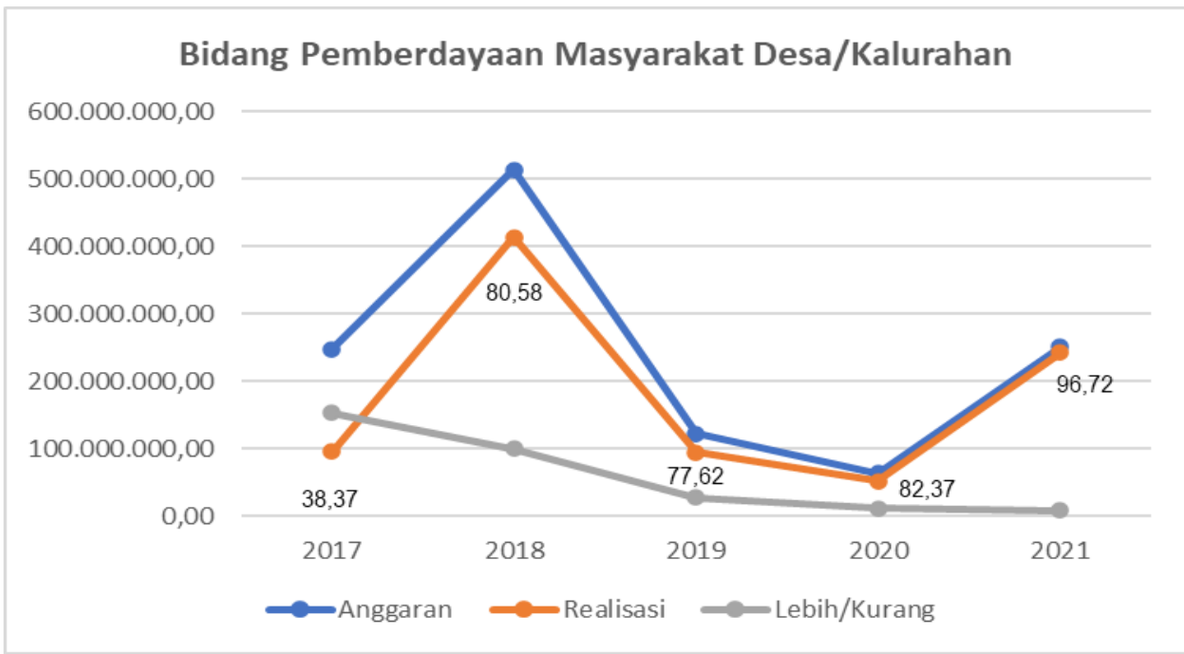


Grafik 2.4. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari Tabel 2.7. dan Grafik 2.4 diketahui Anggaran dan Realisasi kegiatan fuktuatif. Capaian realisasi dari Tahun 2017-2018 naik sebesar 42,21%, Tahun 2018-2019 turun sebesar 2,96%, Tahun

2019-2020 naik sebesar 4,75%, Tahun 2020-2021 naik sebesar 14,35%, fluktuasi capaian realisasi merupakan indikator :

a. evaluasi terhadap Rencana dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kalurahan belum berjalan dengan konsisten.
b. pada perencanaan diperlukan optimalisasi partisipasi unsur masyarakat di kegiatan Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kegiatan Pembentukan BUMDesa sehingga identifikasi kebutuhan lebih tepat sasaran.

Sebagai penjelasan detailnya, berikut dijabarkan Rincian Anggaran dan Realisasi Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 sebagaimana pada Tabel 2.8. berikut.

Tabel 2.8. Rincian Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| NO | URAIAN KEGIATAN | TAHUN 2017 | | | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2017- 2021 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % | ANGGARAN | REALISASI | CAPAIAN % |
| 1 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | - | - | | - | - | | - | - | | 10.000.000 | - | 0,00% | - | - | | 10.000.000 | - | - |
| 2 | Peningkatan Kapasitas Pamong Desa | 6.085.872 | 2.025.000 | 33,27% | 51.820.000 | 49.400.000 | 95,33% | - | - | | - | - | | - | - | | 57.905.872 | 51.425.000 | 88,81% |
| 3 | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 9.050.000 | 8.790.000 | 97,13% | - | - | | - | - | | - | - | | 16.800.000 | 16.800.000 | 100,00% | 25.850.000 | 25.590.000 | 98,99% |
| 4 | Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan | - | - | | 32.500.000 | 29.940.000 | 92,12% | 32.730.000 | 27.930.000 | 85,33% | - | - | | 6.385.000 | 6.310.000 | 98,83% | 71.615.000 | 64.180.000 | 89,62% |
| 5 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 115.302.500 | 114.789.500 | 99,56% | 115.302.500 | 114.789.500 | 99,56% |
| 6 | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan | 11.600.000 | 4.700.000 | 40,52% | - | - | | - | - | | 51.825.000 | 50.695.000 | 97,82% | 94.150.000 | 86.725.000 | 92,11% | 157.575.000 | 142.120.000 | 90,19% |
| 7 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 87.537.132 | 31.815.000 | 36,34% | 72.637.500 | 66.967.211 | 92,19% | 39.349.362 | 24.567.500 | 62,43% | - | - | | - | - | | 199.523.995 | 123.349.711 | 61,82% |
| 8 | Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa | 20.941.000 | 16.181.000 | 77,27% | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |
| 9 | Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | - | - | | 10.000.000 | - | 0,00% | 8.000.000 | 5.740.000 | 71,75% | - | - | | - | - | | 18.000.000 | 5.740.000 | 31,89% |
| 10 | Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) | - | - | | 20.515.000 | 340.000 | 1,66% | 15.802.000 | 7.520.000 | 47,59% | - | - | | - | - | | 36.317.000 | 7.860.000 | 21,64% |
| 11 | Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | - | - | | - | - | | 42.226.000 | 39.351.000 | 93,19% | 1.342.226 | 1.339.351 | 99,79% | - | - | | 43.568.226 | 40.690.351 | 93,39% |
| 12 | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | 18.000.000 | 17.800.000 | 98,89% | 18.000.000 | 17.800.000 | 98,89% |
| 13 | Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | | - | - | |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

## E. Bidang Tak Terduga / Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan

Rencana anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Tak Terduga/Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2.9. Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2017 sampai Tahun 2021

| No | Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anggaran | 127.762.078,00 | 180.202.625,00 | 13.394.216,64 | 892.130.514,00 | 118.226.646,00 |
| 2 | Realisasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858.323.500,00 | 111.290.000,00 |
| 3 | Lebih/Kurang | 127.762.078,00 | 180.202.625,00 | 13.394.216,64 | 33.807.014,00 | 6.936.646,00 |
| 4 | Capaian (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 94,13 |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

Perkembangan anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Tak Terduga/Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat dari Grafik 2.5 berikut.

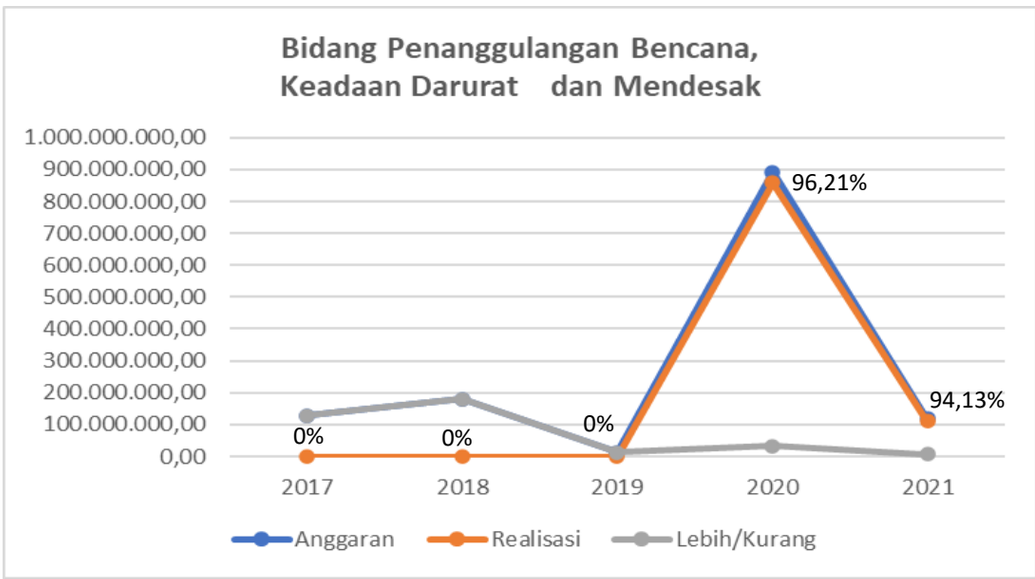


Grafik 2.5. Anggaran dan realisasi Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tahun 2017 sampai Tahun 2021

Dari Tabel 2.9. dan Grafik 2.5 diketahui dari Tahun 2017 sampai Tahun 2019 anggaran relatif tidak besar karena hanya sebagai antisipTsi terhadap bencana banjir yang mungkin terjadi dan tidak ada realisasi kegiatan karena tidak terjadi bencana banjir.

Tahun 2020 sampai Tahun 2021 terjadi bencana Non Alam Pandemi Covid-19 sehingga diperlukan penyesuaian-penyesuaian anggaran sesuai perkembangan Pandemi Covid-19 guna penanganan dan penanggulangan.

Sedangkan rincian realisasi Program Kerja Bidang Tak Terduga/Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan tahun 2017 sampai 2021 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 2.10 berikut.

**Tabel 2.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Program Kerja Bidang Tak Terduga / Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa/Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021**

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) | Anggaran | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2017 | | | TAHUN 2018 | | | TAHUN 2019 | | | TAHUN 2020 | | | TAHUN 2021 | | | TAHUN 2017-2021 | | |
| 1 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam | 127.762.078 | 0 | 0 | | | | 7.386.049 | 0 | 0 | 48.102.217 | 19.523.500 | 40,59 | 24.890.000 | 24.890.000 | 100,00 | 208.140.344 | 44.413.500 | 60,59 |
| 2 | Kegiatan Penanggulanan Kejadian Luar Biasa | - | - | | 36.108.640 | 0 | 0 | - | - | | - | - | | - | - | | 36.108.640 | 0 | - |
| 3 | Penanganan Keadaan Darurat | - | - | | 144.093.985 | 0 | 0 | 2.596.908 | 0 | 0 | 1.628.297 | 0 | - | 3.336.646 | 0 | - | 151.655.836 | 0 | - |
| 4 | Penanganan Keadaan Mendesak | - | - | | - | - | | 3.411.259,64 | 0 | 0 | 842.400.000 | 838.800.000 | 99,57 | 90.000.000 | 86.400.000 | 96,00 | 935.811.260 | 925.200.000 | 118,77 |
| | **JUMLAH** | **127.762.078** | **0** | **0** | **180.202.625** | **0** | **0** | **13.394.216,64** | **0** | **0** | **892.130.514** | **858.323.500** | **96,21** | **118.226.646** | **111.290.000** | 94,13 | **1.331.716.080** | **969.613.500** | **44,84** |

*Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021*

## F. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Trimulyo Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, dapat dijabarkan sebagai berikut :

**1. Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dari tahun 2017 sampai 2021.**

a. Peraturan Desa nomor 1 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimulyo Tahun 2017.
b. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan APBdes Tahun 2017.
c. Peraturan Desa nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimulyo Tahun 2018.
d. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 3 Tahun 20187 tentang Perubahan APBDes tahun anggaran 2018.
e. Peraturan Desa nomor 2 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
f. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran 2019.
g. Peraturan Desa nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
h. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Perdes Nomor 10 Tahun 2019 tentang APB Desa Trimulyo TA 2020.
i. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perdes Nomor 10 Tahun 2019 tentang APB Desa Trimulyo TA 2020.
j. Peraturan Desa Trimulyo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perdes Nomor 10 Tahun 2019 tentang APB Desa Trimulyo TA 2020.
k. Peraturan Desa nomor 13 tahun 2020 tentang APBKal Trimulyo TA 2021.
l. Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2020 tentang APBKal Trimulyo Tahun Anggaran 2021.

2. **Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dari tahun 2017 sampai 2021.**
    a. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2017.
    b. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
    c. Peraturan Desa nomor 1 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
    d. Peraturan Kalurahan nomor 2 tahun 2021 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
    e. Peraturan Kalurahan nomor 1 tahun 2022 tentang Laporan Pertanggung-jawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
3. Rincian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kalurahan dari tahun 2017 sampai 2021.

| Tabel. 2.11. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NO** | **URAIAN** | **RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA / KALURAHAN** | | | | | **TOTAL** |
| | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| 1 | PENDAPATAN DESA / KALURAHAN | | | | | | |
| | Pendapatan Asli Desa | | | | | | |
| | - Hasil usaha desa | 242.482.185,00 | 327.402.055,00 | 476.690.000,00 | 682.000.000,00 | 700.906.000,00 | 2.429.480.240,00 |
| | Pendapatan Transfer | | | | | | |
| | - Dana Desa | 1.076.851.000,00 | 1.312.933.000,00 | 1.471.489.000,00 | 1.558.249.000,00 | 1.890.708.000,00 | 7.310.230.000,00 |
| | - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 142.621.460,00 | 142.621.460,00 | 254.098.400,00 | 254.098.400,00 | 263.017.134,00 | 1.056.456.854,00 |
| | - Alokasi Dana Desa | 1.563.908.000,00 | 1.637.925.000,00 | 1.619.080.000,00 | 1.619.080.000,00 | 1.403.594.500,00 | 7.843.587.500,00 |
| | - Bantuan Keuangan Provinsi | | | | | | 0,00 |
| | - Bantuan Keuangan Kab/Kota | 0,00 | 0,00 | 440.000.000,00 | 370.000.000,00 | 330.000.000,00 | 1.140.000.000,00 |
| | Pendapatan Lain-lain | | | | | | |
| | - Lain-lain pendapatan desa yang sah | 35.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 50.690.000,00 | 51.248.000,00 | 156.938.000,00 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **3.060.862.645,00** | **3.420.881.515,00** | **4.281.357.400,00** | **4.534.117.400,00** | **4.639.473.634,00** | **19.936.692.594,00** |
| 2 | BELANJA DESA / KALURAHAN | | | | | | |
| a | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kalurahan | 1.767.437.532,00 | 1.891.093.008,00 | 1.935.537.066,36 | 2.558.303.156,00 | 2.703.720.231,00 | 10.856.090.993,36 |
| b | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan | 1.678.768.000,00 | 1.627.410.000,00 | 2.453.045.250,00 | 2.384.531.250,00 | 1.719.350.787,00 | 9.863.105.287,00 |
| c | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa / Kalurahan | 697.311.491,60 | 529.186.000,00 | 573.198.000,00 | 429.887.500,00 | 544.590.818,00 | 2.774.173.809,60 |
| d | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kalurahan | 201.942.004,40 | 529.226.969,00 | 121.908.000,00 | 91.567.750,00 | 363.532.500,00 | 1.308.177.223,40 |
| e | Bidang Tidak Terduga / Penanggulangan Bencana | 175.114.534,00 | 16.098.564,00 | 13.394.216,64 | 11.132.755,36 | 126.297.908,00 | 342.037.978,00 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **4.520.573.562,00** | **4.593.014.541,00** | **5.097.082.533,00** | **5.475.422.411,36** | **5.457.492.244,00** | **25.143.585.291,36** |
| | **Surplus/Defisit** | **-1.459.710.917,00** | **-1.172.133.026,00** | **-815.725.133,00** | **-941.305.011,36** | **-818.018.610,00** | **-5.206.892.697,36** |
| 3 | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | |
| A | Penerimaan pembiayaan | **1.459.710.917,00** | **1.172.133.026,00** | **815.725.133,00** | **941.305.011,36** | **818.018.610,00** | **5.272.705.947,36** |
| B | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Selisih Pembiayaan** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## G. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi, dan upaya yang ditempuh selama tahun 2017-2021.

### 1. Keberhasilan Yang Dicapai

Keberhasilan yang dicapai pada pelaksanaan APB Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai Tahun 2021 untuk Kegiatan infrastuktur, telah terbangun:

a. jalan desa / kalurahan : 1.544 m
b. jalan lingkungan permukiman : 10.277,5 m
c. jalan usaha tani : 137 m
d. talud jalan : 1.002,5 m
e. saluran drainasi : 531 m
f. gorong-gorong : 2 unit
g. jembatan : 1 unit
h. saluran irigasi : 335 m
i. sarana prasarana pariwisata : 9 unit
j. bangunan kantor desa / kalurahan : 5 unit

Sedangkan data kegiatan non infrastruktur sebagaimana terperinci pada tabel dalam Tabel 2.12 sampai 2.15 berikut.

#### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan

Tabel 2.12. Realisasi kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan

| NO | Sub Bidang | Kegiatan | Banyaknya/ Jumlah | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Peraturan Perundang-undangan | a. Peraturan Desa/Kalurahan | 7 | 3 | 10 | 13 | 10 | 43 |
| | | b. Peraturan Bersama Lurah | - | | | | | |
| | | c. Peraturan Lurah | - | 3 | 6 | 12 | 21 | 42 |
| | | d. Keputusan Lurah | 37 | 54 | 65 | 82 | 116 | 354 |
| 2. | Kependudukan 2017 | a. Jumlah Penduduk: | | | | | | |
| | | 1) Laki-laki | 9.134 | 9.217 | 9.308 | 9.396 | 9.414 | |
| | | 2) Perempuan | 9.078 | 9.235 | 9.297 | 9.334 | 9.369 | |
| | | 3) Jumlah Kepala Keluarga | 6.098 | 6.218 | 6.288 | 6.360 | 6.454 | |
| | | 4) Jumlah Anggota Kel | | | | | 12.239 | |
| | | 5) Jumlah Jiwa | 18.212 | 18.452 | 18.605 | 18.730 | 18.783 | |
| | | b. Jumlah Penduduk Menurut Tk Pendidikn | | | | | | |
| | | 1) Pendidikan Umum | 13.232 | 13.336 | 13.372 | 13.454 | 13.401 | |
| | | 2) Pendidikan Khusus | 222 | 222 | 565 | 167 | 167 | |
| | | c. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan | | | | | | |
| | | 1) PNS | 443 | 429 | 413 | 404 | 393 | |
| | | 2) TNI/POLRI | 86 | 88 | 90 | 96 | 96 | |
| | | 3) Swasta | 1.823 | 1.976 | 2.045 | 2.106 | 2.812 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pertanahan. | a. Status Tanah:<br>1) Sertifikat Hak Milik<br>2) Sertifikat Hak Guna Usaha<br>3) Sertifikat Hak Pakai | -<br>-<br>30 | | | | | |
| | | b. Luas Tanah :<br>1) Bersertifikat<br>2) Belum Bersertifikat<br>3) Tanah Kas Kalurahan | 9.823 Ha<br>85.3192 Ha<br>86.2475 Ha | | | | | |
| | | c. Peruntukan:<br>1) Jalan<br>2) Tanah Ladang<br>3) Bangunan Umum<br>4) Perumahan<br>5) Ruang Fasilitas Umum | 80.6901 Ha | | | | | |
| | | d. Tanah yang Belum Dikelola :<br>1) Hutan<br>2) Rawa-rawa | | | | | | |
| 4. | Manajemen Pemerintahan | a. Jumlah Aparat Pemerintahan Kalurahan<br>1) PNS<br>2) Non PNS | 29 | 29 | 30 | 31 | 33 | |
| | | b. Jumlah Anggota Bamuskal | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| | | c. Musyawarah Desa | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 27 |
| | | d. Musrengbangdes | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| | | e. Musyawarah Bamuskal | 14 | 14 | 24 | 29 | 38 | 119 |
| 5. | Sosialisasi Produk Hukum Kalurahan | a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Kalurahan<br>1. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Berapa Kali)<br>2. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa (Berapa kali)<br>3. Peraturan Menteri Mengenai Kalurahan (Berapa Kali)<br>b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah<br>1. Sosialisasi Peaturan Daerah Tentang Kalurahan (Berapa Kali)<br>2. Sosialisasi Peraturan Bupati Tentang Kalurahan (Berapa Kali)<br>c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kalurahan<br>1. Sosialisasi Peraturan Kalurahan (Berapa Kali)<br>2. Sosialisasi Peraturan Lurah<br>3. Sosialisasi Peraturan Bersama Lurah Kalurahan (Berapa Kali) | 1<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1 | 1<br>1<br>1<br>1<br>-<br>1 | 5<br>-<br>-<br>-<br>-<br>5<br>-<br>- | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>13<br>4<br>- | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>10<br>5<br>- | 10<br>5<br>5<br>5<br>3<br>30<br>9 |

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2017-2021*

**b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan**

Tabel 2.13. Realisasi kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Desa / Kalurahan

| NO. | Sub Bidang | Kegiatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1 | Sarana dan Prasarana | a. Jalan Kalurahan (m) | - | 352 | 400 | 344 | 448 | 1.544 |
| | | b. Jalan Kabupaten/ Kota (m) | - | - | - | - | - | |
| | | c. Jalan Provinsi (m) | - | - | - | - | - | |
| | | d. Jalan Negara (m) | - | - | - | - | - | |
| | | e. Jembatan (Buah) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | f. Kantor Kepala Desa/ Lurah (Ada/Tidak) | Ada (1keg) | - | Ada (1keg) | Ada (1keg) | Ada (2keg) | 5 keg |
| 2. | Pembangunan Pendidikan | a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum | | | | | | |
| | | 1). Kelompok Bermain (Jumlah) | - | - | 2 | - | - | 2 |
| | | 2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah) | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| | | 3). Sekolah Dasar (Jumlah) | - | - | - | - | - | |
| | | 4). Sekolah Menengah (Jumlah) | - | - | - | - | - | |
| | | 5). Akademi (Jumlah) | - | - | - | - | - | |
| | | 6). Institut/ Sekolah Tinggi (Jumlah) | - | - | - | - | - | |
| | | b.Tempat Pendidikan Khusus | | | | | | |
| | | 1). Pendidikan Pesantren (Jumlah) | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | | 2). Madrasah (Jumlah) | - | | - | - | - | |
| | | 3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah) | 1 | | - | - | - | 1 |
| | | 4). Balai Latihan Kerja (Jumlah) | - | | - | - | - | |
| | | 5). Kursus-Kursus (Jumlah) | - | | - | - | - | |
| 3. | Pembangunan Kesehatan | a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | d. Rumah sakit Mata (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | g. Rumah Bidan (Jumlah) | - | - | - | - | - | - |
| | | h. Puskesmas (Jumlah) | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | i. Apotik (Jumlah) | - | - | - | - | | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman | a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah) | 2 (RTLH) | 5 (RTLH) | 5 (RTLH) 2 (MCK) | 6 (RTLH) 2 (MCK) | 5 (RTLH) 7 (MCK) | 23 (RTLH) 11 (MCK) |
| | | b. Industri Besar (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | c. Industri Sedang (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | e. Tempat Rekreasi (Jumlah) | | | 1 | - | 1 | 2 |
| | | f. Hotel (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | g. Restoran/ Rumah Makan (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | h. Saluran Irigasi (m) | - | - | 85 | - | 250 | 335 |

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2017-2021*

### c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa / Kalurahan

Tabel 2.14. Realisasi kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan Desa / Kalurahan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| 1. | Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat | a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali) | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| | | b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Kalurahan (Ada/ Tidak) | ada | ada | ada | ada | ada | |
| | | c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak) | ya | ya | ya | ya | ya | |
| | | d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan keten- teraman dan ketertiban (Ya/Tidak) | ya | ya | ya | ya | ya | |
| | | e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Kalurahan (Ya/Tidak) | ya | ya | Ya | ya | ya | |
| 2. | Sosial Budaya Masyarakat | a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| | | c. Sosialisasi mengenai ketenteraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa Kali) | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 19 |
| | | e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali) | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 19 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | f. Sosialisai mengenai ketenagakerjaan (Berapa Kali) | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 3. | Sosial Keagamaan | a. Majelis Taklim (Jumlah) | | | 130 | 130 | 130 | |
| | | b. Majelis Gereja (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | c. Majelis Budha (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | d. Majelis Hindu (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | e. Remaja Masjid (Jumlah) | | | 29 | 29 | 33 | |
| | | f. Remaja Gereja (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | g. Remaja Budha (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | h. Remaja Hindu (Jumlah) | | | - | - | - | |
| 4. | Ketenaga-kerjaan | a. Penyalur pembantu RT (Jumlah) | | | - | - | - | |
| | | b. Penampung pekerja ke luar negeri (Jumlah) | | | - | - | - | |
| 5. | Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan Pindah bid 3 | a. Sarana Olahraga: | | | | | | |
| | | 1). Lapangan Umum (Jumlah) | 1 | | - | - | - | -1 |
| | | 2). Lapangan Khusus (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | b.Sarana Keseninan/ Kebudayaan: | | | | | | |
| | | 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 2). Gedung Kesenian (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 3). Gedung Teater (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 4). Gedung Bioskop (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | c.Sarana Sosial: | | | | | | |
| | | 1). Panti Asuhan (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 3). Panti Wordo (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 4). Panti Jompo (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | d. Sarana Komunikasi: | | | | | | |
| | | 1). Radio Komunitas (Jumlah) | | | - | - | - | - |
| | | 2). Papan Pengumuman (Jumlah) | 1 | | - | - | - | 1 |
| 5. | Ketentraman dan Ketertiban | a. Pembinaan Hansip | | | | | | |
| | | 1) Jumlah Anggota | 141 | 141 | 24 | 29 | 38 | - |
| | | 2) Alat Pemadam kebakaran | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | | 3) Jumlah Hansip Terlatih | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | |
| | | b. Ketentraman dan Ketertiban: | | | | | | |
| | | 1) Jumlah Kejadian kriminal | - | - | 6 | 6 | 5 | 17 |
| | | 2) Jumlah Bencana Alam | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | 3) Jumlah Operasi Penertiban | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| | | 4) Jumlah Pos Keamanan | 44 | | | | | |
| | | 5) Jumlah Kecelakaan Remaja | | | | | | |
| 6. | Pembinaan lembagaan Kemasyarakatan. | a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan: | | | | | | |
| | | 1) Rt/Rw – Ada/Tidak | ada | | | | | |
| | | 2) PKK – Ada/Tidak | ada | | | | | |
| | | 3) Karang Taruna – Ada/Tidak | ada | | | | | |
| | | b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak | Ya | | | | | |
| | | c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan - Ya/Tidak | Ya | | | | | |
| | | d. Lembaga Kemasyarakatan diikut sertakan dalam pelaksanaan | Ya | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak | |
| | | e. Lembaga Adat – Ada Tidak | Tidak |
| | | f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Kalurahan terpisah dengan lembaga kemasyarakatan Ya/Tidak | Tidak |

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2017-2021*

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kalurahan**

Tabel 2.14. Realisasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kalurahan

| No. | Sub Bidang | Kegiatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sosialisasi dan motivasi masyarakat | a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali) | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| | | b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali) | | | 4 | 4 | 4 | 12 |
| | | c. Bidang Politik (Berapa Kali) | | | | | | |
| | | d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali) | 1 | | 6 | 6 | 6 | 19 |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat | a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali) | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| | | b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali) | 1 | | 2 | 2 | 2 | 7 |
| | | c. Pemberdayaan olah raga (Berapa Kali) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| | | d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali) | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 3 | Penggalangan Partisipasi Masyarakat | a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali) | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| | | b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali) | 4 | 20 | 12 | 12 | 12 | 60 |

*Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kalurahan Akhir Tahun Anggaran Tahun 2017-2021*

**2. Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh selama Tahun 2017-2021**

**a. Pelaksanaan APB Desa Tahun 2017**

**1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dari 33 ( tiga puluh tiga ) kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada 3 kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagaimana uraian sebagai berikut :

a) tidak adanya kegiatan Penyusunan Raperdes Lainnya diluar penyusunan Peraturan Desa yang rutin dilakukan, pada perencanaan kegiatan tahun selanjutnya agar lebih cermat sesuai dengan kebutuhan;
b) belum terlaksananya kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018; dan

c) Kegiatan Pengisian Staf Desa belum terlaksana karena belum dipahami secara jelas aturan tentang pelaksanaan pengisian Staf Desa, akan dilakukan konsultasi ke Bagian Admin Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul.

**2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dari 18 (delapan belas) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ada 2 (dua) kegiatan yang belum dapat terlaksana, yaitu Kegiatan pembangunan bangunan pendukung desa wisata dan Kegiatan rehabilitasi bangunan pendukung desa wisata. Belum dapat dilaksanakan karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018.

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Dari 25 (dua puluh lima) kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ada 3 kegiatan yang belum dapat terlaksana, yaitu Kegiatan pembinaan pengembangan seni budaya daerah dan Kegiatan fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat. Belum dapat dilaksanakan karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dari 10 (sepuluh) kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat ada 2 (dua) kegiatan yang belum dapat terlaksana, yaitu Kegiatan pelatihan kader kesehatan masyarakat dan Kegiatan pelatihan manajemen BUMDes. Belum dapat dilaksanakan karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan uraian tersebut bahwa pada pelaksanaan APBDesa Tahun 2017 dari 86 kegiatan hanya ada 10 kegiatan atau sebesar 11,63% yang tidak dapat terlaksana, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Upaya agar dapat terlaksana

lebih baik maka terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan:

1) perencanaan berdasarkan prioritas kebutuhan; dan
2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan dan RAB Pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

**b. Pelaksanaa APB Desa Tahun 2018**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dari 30 (tiga puluh) kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ada 5 kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) tidak ada Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Desa diluar penyusunan Peraturan Desa yang rutin dilakukan, sehingga pada perencanaan kegiatan tahun selanjutnya agar lebih cermat sesuai dengan kebutuhan;
b) kegiatan perpanjangan STNK kendaraan dinas tidak dapat terlaksana karena BPKB tidak diketemukan di file arsip, akan dilakukan penertiban arsip dokumen dan kegiatan ini dianggarkan kembali di Tahun 2019;
c) anggaran kegiatan penyusunan/update profil dan monografi Desa tidak direalisasikan, karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh petugas entri data profil dan monografi Desa;
d) kegiatan Monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan belum terlaksana karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2019; dan
e) anggaran Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembengunan tidak direalisasikan karena kegiatan tersebut sudah dilaksanakan oleh TPK Desa, akan melakukan koordinasi dengan TPK Desa agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.

**2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dari 18 (delapan belas) kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ada 2 ( dua ) kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Kegiatan pembangunan bangunan pendukung desa wisata dan kegiatan rehabilitasi bangunan pendukung desa wisata, belum dilaksanakan karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2019

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Dari 25( dua puluh lima ) kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ada 3 kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Kegiatan pembinaan pengembangan seni budaya daerah dan kegiatan fasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat, belum dilaksanakan karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2019

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Dari 21 (sepukuh) kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana, yaitu Kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro berbasis Desa karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, sehingga kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan uraian tersebut bahwa pada pelaksanaan APB Desa Tahun 2018 dari 94 kegiatan hanya ada 11 kegiatan atau sebesar 11,46% yang tidak dapat terlaksana, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik namun belum ada peningkatan yang signfikan. Upaya yang dapat dilaksanakan agar lebih baik maka terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan:

1) perencanaan kegiatan memperhatikan :

a) evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya,

b) prioritas kebutuhan berdasar data: dan
c) partisipasi pengampu kegiatan;

2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan dan RAB Pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
3) koordinasi persiapan pelaksanaan dan koordinasi rutin evaluasi dan capaian realisasi; dan
4) tertib pengarsipan.

**c. Pelaksanaan APB Desa Tahun 2019**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Dari 24 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdapat 13 (tiga belas) kegiatan yang serapannya optimal, 9 (sembilan) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut :

a) penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) serapannya hanya 63, 41 %, karena efisiensi anggaran;.
b) penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) serapannya hanya 41, 75 %, yaitu karena kebutuhan ATK tidak terlalu banyak dan anggaran perjalanan dinas tidak digunakan;
c) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif, serapannya hanya 43, 94 %, karena validasi kemiskinan ditentukan dari Pemerintah Pusat, Puskesos yang terbentuk belum bisa berjalan optimal dan akan dilanjutkan Tahun 2020;
d) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll), serapannya hanya 21, 56 %, yaitu karena tidak ada penyusunan perubahan RKP;
e) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, APBDesa Perubahan, LPJ dll) serapannya hanya 44, 64 %, karena kebutuhan makan dan minum pertemuan penyusunan tidak terealisasi sebanyak dalam anggaran;

f) penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) serapannya hanya 9, 89 %, karena hanya membuat beberapa Peraturan Desa;

g) penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat serapannya hanya 48, 62 %, karena kebutuhan makan dan minum pertemuan penyusunan tidak terealisasi sebanyak dalam anggaran;

h) pengembangan Sistem Informasi Desa hanya terserap 23, 80 %, karena kegiatan belum dilaksanakan secara optimal dan akan dianggarkan lagi di Tahun 2020;

i) lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan hanya terserap 58, 37 % karena tidak ada realisasi kegiatan pengisian staff dan dianggarkan lagi di Tahun 2020;

j) penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa belum terlaksana karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020; dan

k) penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa belum terlaksana karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020.

**2). Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Dari 18 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, terdapat 8 (delapan) kegiatan yang serapannya optimal, 9 (sembilan) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut:

a) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat hanya terlaksana 40,23 % belum terlaksana maksimal karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020.

b) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) hanya terlaksana 68, 96 % yaitu karena efisiensi anggaran.

c) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) hanya tercapai 19, 56 % tidak bisa optimal karena rencana pelaksanaan sering bersamaan dengan kegiatan lain, dianggarkan kembali di tahun 2020.

d) lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan hanya terserap 26, 30 % karena hanya PSN yang terlaksana rutin, fogging hanya dilaksanakan sebagian dan senam bersama instansi hanya terlaksana 1 x, dianggarkan lagi di tahun 2020.

e) pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan) tidak terlaksana karena belum ada Peraturan Desa yang mengatur, akan dilaksanakan setelah Peraturan Desa diundangkan.

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

Dari 14 (empat belas) kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, ada 2 kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes serapannya hanya 69,55 % karena efisiensi anggaran.

b) persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa serapannya hanya 26, 40 % karena hanya operasional harian yang dilaksanakan, simulasi kebencanaan tidak dilaksanakan.

c) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa serapannya 43, 06 %, sebagian pengadaan barang tidak dapat direalisasikan karena kenaikan harga melampaui SHBJ Kabupaten Bantul.

d) lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serapannya hanya 25, 32 % karena piket malam belum dilaksanakan optimal.

e) pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa serapannya 46, 93 % karena pengadaan seragam tidak dilaksanakan dan pelatihan karawitan tidak dilaksanakan sejumlah rencana.
f) pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tingkat Kec/Kab/Kota) serapannya 66, 07 % karena efisiensi anggaran.
g) penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa serapannya 58, 37 % karena kebutuhan ATK dan makan minum lebih sedikit dari penganggaran.
h) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan serapannya hanya 36, 48 % karena Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Dari 5 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat 3 (tiga) kegiatan yang serapannya optimal dan 2 (dua) kegiatan yang serapannya kurang optimal.

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga serapannya hanya 60, 86 % karena efisiensi anggaran.
b) Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) hanya terserap 47,59 % karena kegiatan seleksi pengurus BUMDes terealisasi.

**5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

Dari ketiga kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa tidak ada kegiatan yang terlaksana karena tidak ada bencana.

Memperhatikan uraian tersebut bahwa pada pelaksanaan APB Desa Tahun 2019 dari 64 kegiatan hanya ada 5 kegiatan selain Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan

Mendesak desa atau sebesar 7,81 % yang tidak dapat terlaksana, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat terlaksana lebih baik maka terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan:

1) perencanaan kegiatan memperhatikan :
   a) evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
   b) prioritas kebutuhan berdasar data;
   c) partisipasi pengampu serta pemanfaat kegiatan; dan
   d) program kegiatan yang masuk ke desa.
2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan dan RAB Pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.

**d. Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun 2020**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Dari 25 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yang serapannya optimal, 1 (satu) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif serapannya hanya 25, 49 %, kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena Pandemi Covid-19.
b) Pengembangan Sistem Informasi Desa tidak terlaksana karena pada tahun 2020 Web Desa Trimulyo tidak bisa diakses.
c) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan tidak terlaksana Pelaksana Kegiatan masih memprioritaskan kegiatan lain yang lebih mendesak, kegiatan tersebut dianggarkan kembali di Tahun Anggaran 2020.

**2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Dari 18 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang serapannya optimal, 3 (tiga) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 5 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahannya, terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan hanya terlaksana 50, 64 %, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19.
b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan hanya terlaksana 33, 13 % karena sumber dana PAD masuk rekening desa di akhir tahun, maka dari sisa waktu yang ada tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, dianggarkan kembali di tahun 2021 pada awal tahun.
c) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman hanya tercapai 51, 94 % karena ada penerima program yang meninggal dunia dan tidak bisa dialihkan.
d) Ada 5 kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena Pandemi Covid-19, yang 2 di antaranya direfocusing untuk penanganan Covid-19, khusunya pemberian Bantuan Langsung Tunai.

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Dari 15 (lima belas) kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan ada 4 kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa serapannya hanya 39,17 %, ada kegiatan simulasi bencana yang tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19.
b) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serapannya hanya

63, 69 %, kegiatan sosialisasi hanya dilaksanakan secara terbatas karena Pandemi Covid-19.

c) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa serapannya hanya 30, 47 %, kegiatan latihan-latihan tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

d) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Hara Raya Keagamaan, dll) serapannya hanya 39, 18 %, banyak kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi Covid-19.

e) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat serapannya 58, 19 %, ada kegiatan peningkatan kapasitas LPMD yang tidak bisa dilaksanakan karena Pandemi Covid-19.

f) Ada 4 kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena Pandemi Covid-19, 2 kegiatan direfocusing untuk penanganan Covid-19, khususnya pemberian Bantuan Langsung Tunai.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Dari 4 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, terdapat 2 (tiga) kegiatan yang serapannya optimal dan 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana.

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan yang tidak bisa terlaksana karena Pandemi Covid-19, 1 kegiatan direfocusing untuk penanganan Covid-19, khususnya pemberian Bantuan Langsung Tunai.

**5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Dari ketiga kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan digunakan untuk penanganan Covid-19 seperti pembelian APD, peralatan desinfeksi, kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19 serta sebagian besar untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Memperhatikan uraian tersebut bahwa pada pelaksanaan APB Kalurahan Tahun 2020 dari 65 kegiatan hanya ada 13 kegiatan atau sebesar 20 % yang tidak dapat terlaksana. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penurunan realisasi anggaran lebih karena Pandemi Covid-19 yang trendnya tidak dapat diprediksi, sehingga perubahan kebijakan pemerintah yang beruntun menyebabkan Perubahan APB Kalurahan 2022 berulangkali.

**e. Pelaksanaan APBKalurahan Tahun 2021**

1) **Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Dari 28 kegiatan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yang serapannya optimal, 4 (empat) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut :

a) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong serapannya hanya 44,80 %, karena potongan BPJS Kesehatan sebesar 1 % dari Siltap langsung dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

b) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW serapannya hanya 49,55 %, yaitu karena pelaksanaan terkendala aturan PPKM.

c) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan) serapannya hanya 41,20 %, yaitu karena rencana penyusunan beberapa Peraturan Kalurahan yang belum dapat dilaksanakan karena padatnya agenda kegiatan penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang tidak terencana.

d) Sertifikasi Tanah Kas Desa serapannya hanya 6,75 %, yaitu karena Penundaan kegiatan pengukuran dan pematokan oleh Kantor Pertanahan / BPN Bantul.

e) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa tidak terlaksana karena padatnya agenda kegiatan

penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang tidak terencana.

**2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Dari 18 kegiatan di bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, terdapat 14 (empat belas) kegiatan yang serapannya optimal, 2 (dua) kegiatan yang serapannya kurang optimal, dan 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat terlaksana.

Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan yang serapannya kurang optimal tersebut adalah sebagai berikut:

a) Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan/PSN hanya terlaksana 8,12 % karena fogging hanya dilaksanakan pada saat ada laporan positif DBD dan tahun ini tidak banyak yang terjangkit DBD. PSN tidak maksimal, karena masih membatasi kegiatan interaksi langsung dengan masyarakat dan kegiatan PSN dilaksanakan door to door.
b) Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll) hanya terlaksana 14,17 % yaitu karena tidak banyak kegiatan dan perayaan hari nasional yang mengharuskan membuat poster, banner, dan lain-lain.
c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat tidak terlaksana karena aturan PPKM Pandemi Covid-19.
d) Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) tidak terlaksana karena dikelola bersama dengan PKBM Sapu Lidi disebabkan belum memiliki ruangan tersendiri.

**3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan**

Dari 17 (tujuh belas) kegiatan di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, terdapat 10 (sepuluh) kegiatan yang serapannya optimal, 6 (enam) kegiatan yang serapannya kurang optimal, ada 1 (satu) kegiatan yang tidak dapat terlaksana. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi serta pemecahan terhadap kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemdes hanya terlaksana 12,72 % karena terkendala aturan PPKM Pandemi Covid-19
b) Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan hanya terlaksana 13,98, Pertemuan linmas tidak dapat dilaksanakan karena PPKM Pandemi Covid-19
c) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. Di Bid. Hukum hanya terlaksana 42,06 karena terkendala aturan PPKM Pandemi Covid-19.
d) Pelatihan di bidang keagamaan hanya terlaksana 59,90 karena keterbatasan kegiatan interaksi langsung dengan banyak orang.
e) Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan hanya terlaksana 29,70 karena lomba olah raga tingkat kalurahan yang diwakili Trimulyo, tahun ini tidak diadakan.
f) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD hanya terlaksana 28,67 karena solidaritas kepengurusan LPMKal masih harus ditingkatkan.
1) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan tidak terlaksana karena aturan PPKM Pandemi Covid-19.

**4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Dari 5 kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, semua kegiatan bisa terlaksana secara optimal.

**5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Dari ketiga kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan digunakan untuk penanganan Covid-19 seperti pembelian APD, peralatan desinfeksi dan kegiatan pencegahan Covid-19 serta sebagian besar untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai.

Memperhatikan uraian tersebut bahwa pada pelaksanaan APB Kalurahan Tahun 2021 dari 72 kegiatan hanya ada 4 kegiatan atau sebesar 5,6 % yang tidak dapat terlaksana. Dapat disimpulkan kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana,

namun karena kondisi Pandemi Covid-19 sehingga anggaran tidak dapat terserap optimal. Karena Tahun 2021 adalah tahun kedua Pandemi Covid-19, maka upaya agar serapan lebih optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan menyusun beberapa strategi berdasar kondisi tahun 2020.

Realisasi pelaksanaan kegiatan APB Desa / Kalurahan Tahun 2017 sampai 2021 dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan lebih baik dari tahun sebelumnya. Upaya yang dapat dilakukan agar dapat terlaksana lebih baik maka terdapat beberapa hal yang harus dioptimalkan, antara lain:

1) perencanaan utamanya pada kegiatan-kegiatan yang serapannya kurang optimal dan yang tidak dilaksanakan meskipun dianggarkan kembali di tahun berikutnya antara lain:
   a) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuangan)lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
   b) penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa
   c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
   d) pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
   e) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
   f) pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
   g) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
   h) penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan
   i) pembinaan LKMD/LPM/LPMD

   Agar dalam perencanaan memperhatikan :
   a) evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
   b) prioritas kebutuhan berdasar data;
   c) partisipasi dan sinkronisasi perencanaan antara pelaksana dan pemanfaat kegiatan; dan
   d) program kegiatan Pemerintah Kabupaten / Provinsi / Pusat yang masuk ke desa.

2) penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Rencana Kerja Kegiatan dan RAB Pelaksanaan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan.
3) Tertib administrasi

# BAB III

## RENCANA KEGIATAN 5 (LIMA) BULAN SISA MASA JABATAN

Rencana kegiatan dalam waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan mulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2022, dijabarkan sebagaimana penjelasan di bawah ini secara terperinci meliputi :

1. anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 sampai 31 Mei 2022,
2. rencana pelaksanaan anggaran sampai 31 Oktober 2022,
3. rencana anggaran yang belum terealisasi sampai 31 Oktober 2022,
4. prosentase capaian sampai 31 mei 2022, dan
5. target capaian sampai 31 oktober 2022 yang belum terealisasi.

### 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Tabel 3.1. Rencana pelaksanaan anggaran APBKal Tahun 2022 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sampai 31 Oktober 2022

| NO | URAIAN KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI ANGGARAN s/d 31 Mei 2022 (Rp) | RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN s/d 31 OKTOBER 2022 (Rp) | RENCANA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI s/d 31 OKTOBER 2022 (Rp) | CAPAIAN S/D 31 MEI 2022 (%) | TARGET CAPAIAN S/D 31 OKTOBER 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | C | d | e | f=c-e | g = d/c | h=e/c |
| 1 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah | 63.600.000,00 | 26,500,000.00 | 53.000.000,00 | 10.600.000,00 | 41,67 | 83,33 |
| 2 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan | 916.488.000,00 | 380,157,000.00 | **760.314.000** | 156.174.000,00 | 41,48 | 82,96 |
| 3 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan | 17.236.320,00 | 6,693,247.20 | **13.486.451** | 3.749.868,80 | 38,83 | 78,24 |
| 4 | Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan … | 355.462.324,00 | 118,128,650.00 | **236.257.300** | 119.205.024,00 | 33,23 | 66,46 |
| 5 | Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan | 150.220.000,00 | 56,405,000.00 | **114.340.000** | 35.880.000,00 | 37,55 | 76,12 |
| 6 | Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK … | 23.975.000,00 | 8,488,000.00 | **17.113.000** | 6.862.000,00 | 35,40 | 71,38 |
| 7 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 145.656.000,00 | 0.00 | **74.250.000** | 71.406.000,00 | 0,00 | 50,98 |
| 8 | Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuskal | 93.258.000,00 | 92,943,000.00 | 92.943.000,00 | 315.000,00 | 99,66 | 99,66 |
| 9 | Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan … | 24.000.000,00 | 0.00 | 00.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh | 382.696.600,00 | 382,553,600.00 | **382.553.600** | 143.000,00 | 99,96 | 99,96 |
| 11 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 80.410.000,00 | 42,029,000.00 | **72.000.000** | 8.410.000,00 | 52,27 | 89,54 |
| 12 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 8.925.000,00 | 1,435,000.00 | **6.500.000** | 2.425.000,00 | 16,08 | 72,83 |
| 13 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 177.040.000,00 | 0.00 | **157.040.000** | 20.000.000,00 | 0,00 | 88,70 |
| 14 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 78.790.000,00 | 0.00 | **66.890.000** | 11.900.000,00 | 0,00 | 84,90 |
| 15 | Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa | 2.100.000,00 | 875,000.00 | **1.750.000** | 350.000,00 | 41,67 | 83,33 |
| 16 | Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | 33.600.000,00 | 2,400,000.00 | **23.750.000** | 9.850.000,00 | 7,14 | 70,68 |
| 17 | Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan | 5.005.000,00 | 525,000.00 | **2.890.000** | 2.115.000,00 | 10,49 | 57,74 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 50.290.000,00 | 0.00 | **25.145.000** | 25.145.000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 19 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non … | 68.965.000,00 | 19,102,000.00 | **39.093.500** | 29.871.500,00 | 27,70 | 56,69 |
| 20 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 29.880.000,00 | 0.00 | **12.000.000** | 17.880.000,00 | 0,00 | 40,16 |
| 21 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ… | 11.535.000,00 | 2,736,500.00 | **5.736.500** | 5.798.500,00 | 23,72 | 49,73 |
| 22 | Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa | 2.700.000,00 | 0.00 | **2.700.000** | - | 0,00 | 100,00 |
| 23 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/ Perkades selain Perencanaan/Keuanga… | 29.815.000,00 | 1,890,000.00 | **13.890.000** | 15.925.000,00 | 6,34 | 46,59 |
| 24 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 5.527.500,00 | 2,766,500.00 | **4.666.500** | 861.000,00 | 50,05 | 84,42 |
| 25 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 12.650.000,00 | 0.00 | **5.400.000** | 7.250.000,00 | 0,00 | 42,69 |
| 26 | Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan | 315.027.000,00 | 0.00 | **305.027.000** | 10.000.000,00 | 0,00 | 96,83 |
| 27 | Sertifikasi Tanah Kas Desa | 57.124.000,00 | 0.00 | **24.624.000** | 32.500.000,00 | 0,00 | 43,11 |
| 28 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 76.280.000,00 | 14,600,000.00 | **61.155.000** | 15.125.000,00 | 19,14 | 80,17 |

*Sumber : Siskeudesa tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, dari 28 kegiatan tersebut prosentase serapan anggaran cukup variatif :

1. optimal dengan serapan anggaran lebih dari 75%,
2. cukup optimal dengan serapan anggaran antara 50% s.d. 75%,
3. tidak optimal dengan serapan anggaran di bawah 50%, dan
4. belum terlaksana dengan prosentase serapan anggaran 0%.

a. Serapan optimal ada pada 2 kegiatan yaitu:
   1. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal;
   2. Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh.

   Serapan optimal dikarenakan dana transfer dari Kabupaten tepat waktu sesuai dengan DPA Kalurahan.

b. Serapan cukup optimal ada pada 2 kegiatan yaitu:
   1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
   2. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat.

   Serapan cukup optimal karena :
   1. Ada sebagian kegiatan yang bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran.
   2. Laporan akhir tahun anggaran dapat disusun pada triwulan pertama.

c. Serapan tidak optimal ada pada 14 kegiatan yaitu:
   1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah.

2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan.
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKK dan dan PPKK, Perlengkapan Perkantoran).
5. Penyediaan Tunjangan Badan Permusyawaratan Kalurahan.
6. Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan (rapat, ATK, Makan minum rapat, dll)
7. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
8. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa.
9. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
10. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan.
11. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non reguler)
12. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ, dll).
13. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan).
14. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Serapan tidak optimal karena kebanyakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap bulan, sedangkan saat laporan ini disusun baru terlaksana 5 bulan.

Untuk kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa karena menyesuaikan kebutuhan kantor.

Untuk kegiatan Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan semesteran, dan kegiatan baru dilaksanakan dalam tahap persiapan.

Untuk kegiatan Penyelenggaraan Musyawaran Kalurahan Lainnya (Musdus, rembug desa Non reguler) karena kegiatan musyawarah tersebut disediakan untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis di kalurahan, dan mengenai waktu pelaksanaannya tidak bisa diperkirakan secara tepat di awal tahun anggaran.

Untuk kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ) karena dari RKA dalam DPA ada di pertengahan dan akhir tahun anggaran.

Untuk kegiatan Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena dari RKA dalam DPA pembayaran pajak tanah kas dan pemberian reward PBB ada di pertengahan dan akhir tahun anggaran.

d. Belum dilaksanakan sama sekali ada pada 10 kegiatan yaitu:
   1. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

2. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
4. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih).
5. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes.
6. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll).
7. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
8. Pengembangan Sistem Informasi Desa.
9. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan.
10. Sertifikasi Tanah Kas Desa.

Belum dilaksanakan sama sekali karena kebanyakan dari kegiatan tersebut, dari RKA dalam DPA yang disusun, kegiatan tersebut direncanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran. Untuk Insentif RT karena pendataan belum dilaksanakan, karena isian kuisioner pendataan belum selesai. Untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, karena belum ada SOP.

**2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan**

Tabel 3.2. Rencana pelaksanaan anggaran APBKal Tahun 2022 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan sampai 31 Oktober 2022

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran s/d 31 Mei 2022 (Rp) | Rencana Pelaksanaan Anggaran s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Rencana Anggaran Yang Belum Terealisasi s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Capaian S/D 31 Mei 2022 (%) | Target Capaian s/d 31 Oktober 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | c | d | e | f=c-e | g = d/c | h=e/c |
| 1 | Penyelenggaran PAUD/ TK/ TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa | 39.320.000,00 | 10,945,000.00 | 38.945.000 | 375.000,00 | 27,84 | 99,05 |
| 2 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 47.869.000,00 | 0.00 | 47.869.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Ba… | 3.116.000,00 | 0.00 | 2.766.000 | 350.000,00 | 0,00 | 88,77 |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 78.622.000,00 | 36,079,000.00 | 76.712.000 | 1.910.000,00 | 45,89 | 97,57 |
| 5 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan K… | 90.205.000,00 | 16,265,000.00 | 59.291.500 | 30.913.500,00 | 18,03 | 65,73 |
| 6 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 12.125.000,00 | 6,550,000.00 | 12.125.000 | - | 54,02 | 100,00 |
| 7 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 27.250.000,00 | 3,000,000.00 | 19.750.000 | 7.500.000,00 | 11,01 | 72,48 |
| 8 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Pos… | 388.809.000,00 | 0.00 | 388.809.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 9 | Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting | 68.760.000,00 | 500,000.00 | 60.985.000 | 7.775.000,00 | 0,73 | 88,69 |
| 10 | Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll) | 8.270.000,00 | 850,000.00 | 4.770.000 | 3.500.000,00 | 10,28 | 57,68 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman | 432.890.500,00 | 128,220,000.00 | 432.890.500 | - | 29,62 | 100,00 |
| 12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong… | 41.057.000,00 | 0.00 | 41.057.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni | 123.935.000,00 | 97,125,000.00 | 97.125.000 | 26.810.000,00 | 78,37 | 78,37 |
| 14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip… | 4.857.000,00 | 0.00 | 4.857.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 15 | Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan | 5.665.000,00 | 0.00 | 3.360.000 | 2.305.000,00 | 0,00 | 59,31 |
| 16 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 12.075.000,00 | 7,575,000.00 | 10.075.000 | 2.000.000,00 | 62,73 | 83,44 |
| 17 | Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll) | 1.800.000,00 | 600,000.00 | 1.200.000 | 600.000,00 | 33,33 | 66,67 |
| 18 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 160.572.500,00 | 100,310,000.00 | 160.572.500 | - | 62,47 | 100,00 |
| 19 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan | 11.725.000,00 | 3,625,000.00 | 9.000.000 | 2.725.000,00 | 30,92 | 76,76 |
| 20 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 4.500.000,00 | 2,000,000.00 | 3.250.000 | 1.250.000,00 | 44,44 | 72,22 |
| 21 | Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan | 5.850.000,00 | 0.00 | 2.500.000 | 3.350.000,00 | 0,00 | 42,74 |

*Sumber : Siskeudesa tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, dari 21 kegiatan tersebut prosentase serapan anggaran cukup variatif :

1. optimal dengan serapan anggaran lebih dari 75%,
2. cukup optimal dengan serapan anggaran antara 50% s.d. 75%,
3. tidak optimal dengan serapan anggaran di bawah 50%, dan
4. belum terlaksana dengan prosentase serapan anggaran 0%.

a. Serapan optimal ada pada 1 kegiatan yaitu Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
   Serapan optimal dikarenakan kegiatan bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

b. Serapan cukup optimal ada pada 3 kegiatan yaitu:
   1. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.
   2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
   3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

   Serapan cukup optimal karena :
   1. Penyuluhan dan pembinaan pengurangan AKI dan AKB dilaksanakan di awal tahun anggaran.
   2. Kegiatan dilaksanakan rutin dan pemberian barang ke masyarakat dilaksanakan di awal tahun anggaran.
   3. Kegiatan pembangunan Lampu penerangan dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

c. Serapan tidak optimal ada pada 10 kegiatan yaitu:
    1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa.
    2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif).
    3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader kesehatan, dll).
    4. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB).
    5. Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting.
    6. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,Dll).
    7. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman.
    8. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll).
    9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan.
    10. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata.

    Serapan tidak optimal karena untuk kegiatan nomor 1 s.d. 6, nomor 9 dan 10 merupakan kegiatan rutin, di mana pada saat laporan ini disusun kegiatan tersebut baru terlaksana selama 5 bulan. Untuk kegiatan nomor 7 karena direncanakan dalam DPA pada awal, pertengahan, dan akhir tahun anggaran. Untuk kegiatan nomor 8 karena pada pelaksanaannya masih mengikuti instruksi dari Kabupaten.

d. Belum dilaksanakan sama sekali ada pada 7 kegiatan yaitu:
    1. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) .
    2. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca).
    3. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu)
    4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan, dll).
    5. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih).
    6. Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan.
    7. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan.

    Belum dilaksanakan sama sekali karena untuk kegiatan nomor 1, 3, 4, 5 merupakan kegiatan PPBMP dimana dari RKA dalam DPA disusun pada pertengahan tahun anggaran. Untuk kegiatan nomor 2 karena belum tersedianya ruangan tersendiri untuk kegiatan keperpustakaan. Untuk kegiatan nomor 7 dan 8 karena dari RKA dalam DPA yang disusun,

kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran.

### 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Tabel 3.3. Rencana pelaksanaan anggaran APBKal Tahun 2022 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan sampai 31 Oktober 2022

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran s/d 31 Mei 2022 (Rp) | Rencana Pelaksanaan Anggaran s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Rencana Anggaran Yang Belum Terealisasi s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Capaian S/D 31 Mei 2022 (%) | Target Capaian s/d 31 Oktober 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | C | d | e | f=c-e | g = d/c | h=e/c |
| 1 | Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan | 19.125.000,00 | 4,300,000.00 | 14.825.000 | 4.300.000,00 | 22,48 | 77,52 |
| 2 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe | 9.900.000,00 | 0.00 | 9.900.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan | 14.030.289,00 | 4,200,000.00 | 9.830.289 | 4.200.000,00 | 29,94 | 70,06 |
| 4 | Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan | 16.375.000,00 | 631,953.00 | 15.743.047 | 631.953,00 | 3,86 | 96,14 |
| 5 | Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung | 7.875.000,00 | 3,350,000.00 | 4.525.000 | 3.350.000,00 | 42,54 | 57,46 |
| 6 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana | 2.830.000,00 | 0.00 | 2.830.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 7 | Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana | 126.055.000,00 | 17,722,500.00 | 108.332.500 | 17.722.500,00 | 14,06 | 85,94 |
| 8 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan | 21.350.000,00 | 2,900,000.00 | 16.150.000 | 5.200.000,00 | 13,58 | 75,64 |
| 9 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan | 20.400.000,00 | 0.00 | 16.925.000 | 3.475.000,00 | 0,00 | 82,97 |
| 10 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI) | 50.570.000,00 | 0.00 | - | 50.570.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Pembinaan Bidang Keagamaan | 29.480.000,00 | 8,350,000.00 | 29.480.000 | - | 28,32 | 100,00 |
| 12 | Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan | 3.000.000,00 | 0.00 | 3.000.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 13 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan | 10.820.000,00 | 3,640,000.00 | 9.000.000 | 1.820.000,00 | 33,64 | 83,18 |
| 14 | Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan | 30.385.000,00 | 9,250,500.00 | 24.385.000 | 6.000.000,00 | 30,44 | 80,25 |
| 15 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 3.950.000,00 | 0.00 | 3.950.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 16 | Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan | 15.537.000,00 | 1,000,000.00 | 14.537.000 | 1.000.000,00 | 6,44 | 93,56 |
| 17 | Pembinaan PKK | 56.470.000,00 | 24,563,500.00 | 53.970.000 | 2.500.000,00 | 43,50 | 95,57 |

*Sumber : Siskeudesa tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dari 17 kegiatan tersebut prosentase serapan anggaran cukup variatif :

1. optimal dengan serapan anggaran lebih dari 75%,
2. cukup optimal dengan serapan anggaran antara 50% s.d. 75%,
3. tidak optimal dengan serapan anggaran di bawah 50%, dan
4. belum terlaksana dengan prosentase serapan anggaran 0%.

a. Serapan optimal ada pada 0 kegiatan karena kebanyakan kegiatan di bidang pembinaan merupakan kegiatan rutin, di mana pada saat laporan ini disusun baru terlaksana 5 bulan, ada kegiatan di mana DPA yang disusun direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran, dan untuk kegiatan Penguatan Desa Aman Covid, karena trend covid sudah turun bahkan sudah menjadi zona hijau, maka anggaran jadi tidak terserap.
b. Serapan cukup optimal ada pada 0 kegiatan karena kebanyakan kegiatan di bidang pembinaan merupakan kegiatan rutin, di mana pada saat laporan ini disusun baru terlaksana 5 bulan, ada kegiatan di mana dari RKA dalam DPA yang disusun direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran, dan untuk kegiatan Penguatan Desa Aman Covid, karena trend covid sudah turun bahkan sudah menjadi zona hijau, maka anggaran jadi tidak terserap.
c. Serapan tidak optimal ada pada 11 kegiatan yaitu:
    1. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan.
    2. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan.
    3. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan.
    4. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung.
    5. Penguatan Desa Aman Covid-19/Desa Tangguh Bencana.
    6. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan.
    7. Pembinaan Bidang Keagamaan.
    8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan.
    9. Pembinaan Karangtaruna/ Klub Kepemudaan/ Olahraga Tingkat Kalurahan.
    10. Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan.
    11. Pembinaan PKK.

    Serapan tidak optimal karena untuk kegiatan nomor 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 s.d. 11 merupakan kegiatan rutin yang ada di Kalurahan, dimana pada saat laporan ini disusun, kegiatan tersebut baru terlaksana selama 5 bulan. Untuk kegiatan nomor 4, karena dari rencana 2 kali kegiatan baru terlaksana 1 kegiatan, dimana waktu pelaksanaan kegiatan masih ada kasus Covid, sehingga peserta yang diundang terbatas. Untuk kegiatan Desa Aman Covid karena trend covid sudah turun bahkan sudah menjadi zona hijau, maka anggaran jadi tidak terserap optimal.
d. Belum dilaksanakan sama sekali ada pada 6 kegiatan yaitu:
    1. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan.

2. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana.
3. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Kalurahan.
4. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI).
5. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan.
6. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Belum dilaksanakan sama sekali karena berdasarkan RKA dalam DPA yang disusun, kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran.

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan**

Tabel 3.4. Rencana pelaksanaan anggaran APBKal Tahun 2022 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan sampai 31 Oktober 2022

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran s/d 31 Mei 2022 (Rp) | Rencana Pelaksanaan Anggaran s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Rencana Anggaran Yang Belum Terealisasi s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Capaian S/D 31 Mei 2022 (%) | Target Capaian s/d 31 Oktober 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | c | d | e | f=c-e | g = d/c | h=e/c |
| 1 | Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan | 3.520.000,00 | 0,00 | 3.520.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 3 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana | 81.690.000,00 | 0,00 | 81.690.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) d… | 198.745.000,00 | 100.311.250,00 | 170.311.250 | 28.433.750,00 | 50,47 | 85,69 |
| 5 | Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan | 2.615.000,00 | 0,00 | | 2.615.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.400.000 | 80.000,00 | 0,00 | 94,59 |
| 7 | Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak | 4.120.000,00 | 0,00 | 4.120.000 | - | 0,00 | 100,00 |
| 8 | Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM | 22.275.000,00 | 0,00 | 20.000.000 | 2.275.000,00 | 0,00 | 89,79 |

*Sumber : Siskeudesa tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, dari 8 kegiatan tersebut prosentase serapan anggaran cukup variatif :

1. optimal dengan serapan anggaran lebih dari 75%,
2. cukup optimal dengan serapan anggaran antara 50% s.d. 75%,
3. tidak optimal dengan serapan anggaran di bawah 50%, dan
4. belum terlaksana dengan prosentase serapan anggaran 0%.

a. Serapan cukup optimal ada pada 1 kegiatan Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian karena pemberian bantuan pompa air bisa dilaksanakan pada awal tahun anggaran.

b. Belum dilaksanakan sama sekali ada pada 7 kegiatan yaitu:
   1. Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll).
   2. Bimtek/Pelatihan/Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan.
   3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana.
   4. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan.
   5. Peningkatan Kapasitas BAMUSKAL.
   6. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak.
   7. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM.

   Belum dilaksanakan sama sekali karena kegiatan-kegiatan tersebut dari RKA dalam DPA yang disusun akan dilaksanakan pada pertengahan dan akhir tahun anggaran.

**5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan**

Tabel 3.5. Rencana pelaksanaan anggaran APBKal Tahun 2022 Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan sampai 31 Oktober 2022

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran s/d 31 Mei 2022 (Rp) | Rencana Pelaksanaan Anggaran s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Rencana Anggaran Yang Belum Terealisasi s/d 31 Oktober 2022 (Rp) | Capaian S/D 31 Mei 2022 (%) | Target Capaian s/d 31 Oktober 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | B | c | d | e | f=c-e | g = d/c | h=e/c |
| 1 | Penanggulanan Bencana | 1.472.500,00 | 0,00 | 1.472.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Penanganan Keadaan Darurat | 1.758.885,00 | 0,00 | 1.758.885,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Bantuan Langsung Tunai (BLT | 648.000.000,00 | 540.000.000 | 108.000.000,00 | 41,67 | 83,33 | 540.000.000 |

*Sumber : Siskeudesa tahun 2022*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan, dari 3 kegiatan tersebut prosentase serapan anggaran sebagai berikut :

1. tidak optimal dengan serapan anggaran di bawah 50%, dan
2. belum terlaksana dengan prosentase serapan anggaran 0%.

a. Serapan tidak optimal ada pada 1 kegiatan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena pencairan dilaksanakan per bulan, sehingga pada saat penyusunan laporan ini baru terlaksana 5 kali.
b. Belum dilaksanakan sama sekali ada pada 2 kegiatan yaitu:
   1. Penanggulanan Bencana
   2. Penanganan Keadaan Darurat

Belum dilaksanakan sama sekali karena tidak ada kejadian darurat maupun bencana.

**6. Rangkuman**

Pada prinsipnya setiap kegiatan berjalan sesuai dengan RKA dalam DPA yang disusun setelah APBKal diundangkan. Untuk kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal atau belum dilaksanakan karena ada kaitannya dengan pihak luar kalurahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, selalu dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

# BAB IV
# PENUTUP

Melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 maka kami susun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo, dari kurun waktu 6 (enam) tahun mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

**a. Kesimpulan Laporan**

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan yang kami susun, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan selalu mengalami kenaikan anggaran maupun realisasi.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan selalu mengalami kenaikan anggaran maupun realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Tetapi terus mengalami penurunan anggaran maupun realisasi secara signifikan karena adanya Pandemi Covid-19.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan cenderung mengalami penurunan anggaran maupun realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Tetapi terus mengalami kenaikan anggaran maupun realisasi secara signifikan pada tahun-tahun berikutnya karena Pandemi Covid-19 yang sudah mulai menurun.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan mengalami kenaikan anggaran maupun realisasi secara signifikan di tahun 2018. Tetapi mengalami penurunan anggaran maupun realisasi yang signifikan juga pada 2 tahun berikutnya. Selanjutnya mengalami kenaikan kembali.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan dari tahun 2017 sampai tahun 2019 tidak ada penganggaran maupun realisasi kegiatan. Tetapi di tahun 2020 mengalami kenikan anggaran maupun realisasi secara signifikan karena Pandemi Covid-19. Selanjutnya mulai menurun kembali seiring penurunan Pandemi Covid-19.

6. Banyak sedikitnya anggaran maupun realisasi kegiatan Kalurahan dipengaruhi oleh kebutuhan kalurahan itu sendiri.

**b. Penyampaian Ucapan Terima Kasih**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan tidak mungkin dapat kami selenggarakan sendiri tanpa dukungan semua pihak, baik Pamong, Staf, Bamuskal, Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, seluruh masyarakat beserta tokoh-tokohnya, semua unsur supra Kalurahan yang ada, serta semua pihak yang tidak dapat tersebutkan satu-persatu. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung kami dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Besar harapan kami dukungan akan tetap diberikan kepada kami kedepannya. Permohonan maaf yang tulus juga kami sampaikan atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini.

**c. Permohonan Saran dan Petunjuk**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Masa Jabatan Lurah Trimulyo Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ini kami susun masih dalam keadaan banyak kekurangan. Sebelum kami sampaikan kepada Bapak Bupati Bantul, besar harapan kami Bapak Panewu Kapanewon Jetis berkenan memberikan evaluasi. Berikan kami saran dan petunjuk bagi perbaikan dan penyempurnaannya. Sehingga Bapak Bupati Bantul nantinya dapat menetapkan kebijakan berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai dengan kinerja, prestasi, program dan potensi Kalurahan. Mana yang perlu dikembangkan dan disempurnakan. Sehingga dapat menjadi catatan dan perhatian kami dalam membuat atau menyusun kebijakan Kalurahan kedepannya.

Trimulyo, 19 Juli 2022

LURAH TRIMULYO,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMULYO
KAPANEWON JETIS

JAUZAN SANUSI